

LAPORAN AKHIR

**KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI PROGRAM HIBAH
DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2013**



JUDUL

**POLA PERILAKU POLITIK DI INDONESIA DAN POLA
PENANGANANNYA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
STUDI DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI POLITIK**

**Tahun ke 1 dari
rencana 2 tahun**

Ketua/Anggota Tim:

**Dr. Zainal Abidin, M.Si./ 0022096203
Dr. A. Gimmy Prathama Siswadi, M.Si./0028086202
Dr. RA Suherman. M.Si./0008025101**

Dibiayai oleh :

**Dana DIPA UNPAD
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor : 023.04.2/189726/2012
Tanggal : 5 DESEMBER 2012**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
November, 2013**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Kegiatan : POLA PERILAKU KORUPSI POLITIK DI INDONESIA DAN POLA PENANGANANNYA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). STUDI DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI POLITIK

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 395 / Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum

Bidang Unggulan PT : Kebijakan, Budaya dan Informasi : Peningkatan Kualitas Hidup dan Harmonisasi Sosial

Topik Unggulan : Kelembagaan dan Governance

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. ZAINAL ABIDIN M.Si.
B. NIDN : 0022096203
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : Psikologi
E. Nomor HP : 0818102123
F. Surel (e-mail) : znlabidin@unpad.ac.id

Anggota Peneliti (1)

A. Nama Lengkap : Drs. R A SUHERMAN M.Si.
B. NIDN : 0008025101
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PADJADJARAN

Anggota Peneliti (2)

A. Nama Lengkap : Dr. AHMAD GIMMY PRATHAMA S M.Si
B. NIDN : 0028086202
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PADJADJARAN

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 139.500.000,00

Biaya Tahun Berjalan :

- diusulkan ke DIKTI	Rp 139.500.000,00
- dana internal PT	Rp 0,00
- dana institusi lain	Rp 0,00
- inkind sebutkan	



Mengetahui
Dekan Fakultas Psikologi UNPAD

Hendriati
(Dr. Hj. Hendriati Agustiani, M.Si.)
NIP/NIK 195908041986032002



Menyetujui
Ketua LPPM UNPAD
(Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S.)
NIP/NIK 196205271988101001

Jatinangor, Bandung, 27 - 11 - 2013,
Ketua Peneliti,

Zainal Abidin
(Dr. ZAINAL ABIDIN M.Si.)
NIP/NIK 196209221992031001

RINGKASAN

Sejumlah lembaga anti-korupsi asing seperti *Tranparency International* dan *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 11 tahun terakhir tidak menurunkan dorongan para pelaku (politisi, pejabat, penegak hukum, dan pengusaha) untuk melakukan korupsi. Sejumlah kasus korupsi yang relatif baru terus bermunculan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh KPK. Oleh sebab itu, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (1) Bagaimana gambaran profil psikologis para pelaku korupsi? apa sebetulnya motif para pelaku melakukan korupsi; bagaimana gambaran pusat kendali perilaku (*locus of control*) mereka? bagaimana trait kepribadian mereka? (2) apa saja dan bagaimana pola-pola perilaku korupsi yang dilakukan oleh mereka, dan (3) bagaimana pola-pola penanganan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi tersebut? Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peneliti (Abidin, 2013) pernah melakukan studi pendahuluan untuk menjawab pertanyaan (2) dan (3). Namun, sumber datanya masih terbatas pada kajian naskah berita dari media massa. Maka, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara lebih komprehensif. Dalam rangka ini peneliti berencana melakukan 2 tahap penelitian selama 2 tahun. Tahap (tahun) pertama adalah melakukan penambahan dan perluasan analisis kasus-kasus korupsi. Sumber datanya, selain berasal dari media massa dan website KPK, juga dari hasil interviu dengan para petinggi KPK dan *self-report* (melalui pengisian angket) tentang gambaran psikologis (kepribadian, *locus of control*, motivasi) para pelaku korupsi. Tahap (tahun) kedua, selain terus meg-update data dari media massa, juga menambah jumlah sampel (pelaku korupsi) untuk mengisi angket kepribadian, motivasi, dan *locus of control* sehingga dapat ditemukan pola korupsi dan psikologi korupsi secara lebih komprehensif dan mendalam. Beberapa persidangan di pengadilan yang menyidangkan beberapa tersangka akan diobservasi oleh tim peneliti. Pada tahap ini pun akan dilakukan interviu terhadap para penyidik dan

pimpinan KPK, baik untuk mendapatkan data terbaru maupun untuk validasi laporan penelitian tahun pertama. Data dari media massa dan website KPK akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*); data hasil interviu dianalisis dengan teknik koding sebagaimana dilakukan oleh Strauss and Corbin (2000); sedangkan data *self-report* dari angket tentang kepribadian dan motivasi dianalisis menggunakan statistic deskriptif. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pemahaman dan penjelasan ilmiah mengenai gambaran psikologis (*profile* motivasi, *locus of control* dan kepribadian) para pelaku korupsi politik, pola-pola perilaku korupsi politik, dan penanganan korupsi politik di Indonesia. Adapun secara praktis, khusus untuk KPK dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan penanganan korupsi.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi energi dan pengetahuan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan laporan kemajuan penelitian ini.

Penelitian ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan sejumlah pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, Rektor UNPAD, yang telah memberi perhatian khusus kepada tim peneliti untuk mengkaji kasus-kasus korupsi dan menjawab pertanyaan, “kenapa manusia Indonesia cenderung korupsi?”
2. Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS., Ketua LPPM Unpad, dan Pak Sonyd selaku Sekretaris LPPM Unpad, beserta semua staf di LPPM Unpad. Khususnya kepada Pak Gumilar, terima kasih untuk bantuannya yang luar biasa. Kesederhanaan, keterbukaan, dan keramah-tamahan para insan di lembaga ini telah mendorong tim peneliti untuk menuntaskan tugas penelitian ini secara sungguh-sungguh.
3. Dr. Hj. Hendriati Agustiani, M.Si., Dekan Fakultas Psikologi Unpad, yang selalu mendukung tim peneliti untuk melakukan penelitian.
4. Johan Budi SP, Direktur Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Dede, Ason, Pak Endang, Pak Kanda, dan seluruh civitas academica Fakultas Psikologi Unpad, yang selalu siap membantu tim peneliti dalam memecahkan kesulitan teknis dan prosedural penulisan
6. Kepala Lapas Sukamiskin dan terutama kepada Ibu Yusti dan Pak Andri yang sangat membantu pelaksanaan pengambilan data di lokasi
7. Sejumlah individu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua selalu diberkati oleh Allah SWT.

Jatinangor, 22 November 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hasil Studi Awal Tentang Korupsi	7
2.2 Korupsi	10
2.2.1. Korupsi Politik	11
2.2.2. Korupsi Menurut UU Anti-Korupsi	14
2.2.3. Sebab-sebab Korupsi	15
2.2.4. Sebab-sebab Psikologis Munculnya Korupsi : <i>Traits</i> Kepribadian, Motivasi, dan <i>Locus of Control</i>	19
2.2.5. Dampak Korupsi	32
2.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	34
2.4 Psikologi Politik	37
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	39
3.1 Tujuan Penelitian	39
3.2 Manfaat Penelitian	39
BAB 4. METODE PENELITIAN	41

4.1	Metode dan Sumber Data	41
4.2	Teknik Analisis Data	44
BAB 5.	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1	Pengantar	46
5.2	Jumlah dan Data Demografis Responden	46
5.3	Gambaran Psikologis Pelaku Korupsi	48
5.3.1	Profil Kepribadian	48
5.3.2	Profil Motif	49
5.3.3	Profil <i>Locus of Control</i>	51
5.4	Pola Perilaku Korupsi	52
5.4.1	Pola Korupsi Anggota DPR	52
5.4.2	Pola Korupsi Menteri	62
5.4.3	Pola Korupsi Gubernur	65
5.4.4	Pola Korupsi DPRD	71
5.4.5	Pola Korupsi Anggota/Petinggi Tentara Nasional Indonesia	81
5.4.6	Pola Korupsi Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)	84
5.4.7	Pola Korupsi/Pejabat BUMN, PLN, Pertamina, BI, Pajak, dll.	89
5.4.8	Pola Korupsi Jaksa, Hakim, dan para Pegawai yang Berhubungan dengan Penegakan Hukum	99
5.4.9	Pola Korupsi Pengacara	107
5.4.10	Pola Korupsi Pengusaha	109
5.4.11	Pola Korupsi Bupati/Wali Kota	117
5.4.12	Pembahasan Umum tentang Pola Korupsi	129
5.5	Hasil dan Pembahasan tentang pola kerja KPK	130
5.5.1	Pola Kerja KPK	131
5.5.2	Tim Kerja dalam KPK	134
5.5.3	Perkembangan Pola Kerja KPK	135

5.5.4	Evaluasi Kritis Terhadap KPK	137
BAB 6.	RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	139
BAB 7.	KESIMPULAN DAN SARAN	140
7.1	Kesimpulan	140
7.2	Saran	143
	DAFTAR PUSTAKA	145
	LAMPIRAN 1 : INSTRUMEN (INVENTORY/ANGKET)	149
	LAMPIRAN 2: GAMBAR LOKASI DAN SITUASI PENELITIAN DI LAPAS SUKAMISKIN, BANDUNG	159
	LAMPIRAN 3: PERSONALIA TENAGA PENELITI DAN KUALIFIKASINYA	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profesi Pelaku Korupsi.....	3
Tabel 2.1	Ciri-ciri Setiap Trait dan The Big Five Personality	27
Tabel 5.2.1.1	Jenis profesi/pekerjaan	47
Tabel 5.2.1.2	Pasal UU yang dilanggar	47
Tabel 5.2.1.3	Pengakuan keterlibatan	47
Tabel 5.4.1	Kasus-kasus Korupsi Anggota DPR	52
Tabel 5.4.2	Kasus-kasus Korupsi Menteri	62
Tabel 5.4.3	Kasus-kasus Korupsi Gubernur	65
Tabel 5.4.4	Kasus-kasus Korupsi Anggota DPRD	71
Tabel 5.4.5	Kasus-kasus Korupsi di TNI	81
Tabel 5.4.6	Kasus-kasus Korupsi di Polri	84
Tabel 5.4.7	Pola Korupsi Pegawai/Pejabat BUMN, PLN, Pertamina, BI, Pajak, dll.	89
Tabel 5.4.8	Pola Korupsi Jaksa, Hakim, dan para pegawai yang berhubungan dengan penegakan hukum	99
Tabel 5.4.9	Kasus-kasus Korupsi di kalangan Pengacur	107
Tabel 5.4.10	Kasus-kasus Korupsi di kalangan pengusaha	109
Tabel 5.4.11	Kasus-kasus Korupsi Bupati/Wali Kota	117

DAFTAR GAMBAR

Diagram 5.3.1	Profil Kepribadian	48
Diagram 5.3.2	Profil Motivasi (Motif)	50
Diagram 3.3.3	Profil <i>Locus of control</i>	51

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harapan segenap lapisan masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru antara lain adalah terciptanya pemerintahan yang demokratis, bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Pemerintahan yang demikian diharapkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik, antara lain memiliki kebebasan politik, bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, dan tentu saja kehidupan ekonomi yang lebih makmur dan sejahtera.

Akan tetapi, tumbangya Orde Baru dan dibentuknya pemerintahan Reformasi tidak serta-merta tercipta pemerintahan yang dicita-citakan. Meski harus diakui bahwa di bidang politik ada perubahan yang lebih baik (yakni, dalam hubungannya dengan kebebasan berpolitik, mengemukakan pendapat, dan berserikat), tetapi di bidang-bidang lain terdapat sejumlah peristiwa yang kontra-produktif. Sebut saja misalnya, makin maraknya konflik antar kelompok dan antar etnis, anarkisme massa, dan semakin tumbuh pesatnya perilaku dan kebiasaan korupsi di lingkungan birokrasi, hukum, bisnis, dan politik. Kasus-kasus korupsi dewasa ini jauh lebih banyak terjadi dibandingkan pada masa Orde Baru. Jika pada jaman Orde Baru korupsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kalangan eksekutif (birokrasi) dan yudikatif, tetapi dewasa ini dilakukan secara transparan dan menyebar ke lembaga-lembaga legislatif dan dunia bisnis.

Oleh sebab itu, atas desakan masyarakat dan para aktivis Reformasi, pada awal tahun 2000 pemerintah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk sebuah komisi yang diharapkan mampu memberantas korupsi. Komisi itu diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak berdirinya KPK bulan Desember 2002 hingga akhir Desember 2012, sudah ratusan pejabat, birokrat, politisi, penegak hukum, dan pengusaha ditangkap oleh KPK dan diadili serta diberi hukuman oleh Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) dan sejak tahun 2008 oleh Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR). Untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada para koruptor dan bakal koruptor sampai ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sejak 2012, KPK menangani kasus-kasus korupsi bukan hanya yang terjadi di pusat kekuasaan (di Jakarta), tapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Perburuan dan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Buol (Amran Batalipu), Sulawesi Tengah, adalah salah satu contoh kinerja KPK dewasa ini dalam memberantas korupsi. Akan tetapi, meski KPK sudah menjalankan fungsinya selama lebih 10 tahun, dan telah ratusan koruptor dijadikan tersangka dan terpidana (Laporan Tahunan KPK, 2012) kasus-kasus korupsi tidak menghilang, bahkan kasus-kasus baru bermunculan. Seolah tidak takut akan konsekuensi hukum yang dapat menimpa mereka, para pelaku korupsi terus melakukan korupsi. Menurut hasil kajian Indonesia Corruption Watch atau ICW (dalam Kompas, 5/8/2010), telah terjadi peningkatan tajam tren korupsi semester I tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 dalam:

- Jumlah kasus: terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat: 86 kasus (2009) menjadi 176 kasus (2010).
- Kerugian negara: tahun 2009 kerugian mencapai Rp 1,17 triliun, lalu meningkat mencapai Rp 2,1 triliun.
- Pelaku: terjadi peningkatan dari 217 menjadi 441 tersangka

Temuan ICW tersebut berasal dari data pertengahan (semester 1) tahun 2010. Diperkirakan bahwa sesudah semester 2 tahun 2010 hingga saat ini, jumlah kerugian negara jauh lebih besar lagi. Sebagaimana diungkap oleh Tempo, jumlah kerugian uang negara di semester 2013 (hingga Juli 2013) saja, diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun (Tempo, edisi 16-22 September 2013). Sedangkan sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK terus bertambah (lihat Tabel 1.1), dan diantaranya sangat menarik perhatian media dan masyarakat. Sebut saja misalnya kasus Buol yang melibatkan Bupati Amran Batalipu dan pengusaha dari Jakarta Hartati

Murdaya; kasus Hambalang, yang menyeret Anas Urbaningrum dan Andi Alfian Mallarangeng, dan PON Riau yang melibatkan para petinggi Partai Golkar dan pejabat daerah; kasus impor daging sapi yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera; kasus simulator kendaraan bermotor yang melibatkan 2 Jenderal kepolisian, yakni Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo; dan kasus di TNI yang melibatkan Mayjen Djadja Suparman. Kasus-kasus korupsi yang termasuk dalam *grand corruption* dan *political corruption* tersebut (kecuali kasus Mayjen Djadja Suparman), kini sedang ditangani oleh KPK.

Tabel 1.1. Profesi Pelaku korupsi

No	Asal Pelaku Korupsi	Jumlah
1	Pejabat (eselon I, II, III)	114
2	Swasta (pengusaha)	85
3	Anggota DPR/DPRD	72
4	Wali kota / bupati dan wakil	34
5	Gubernur	9
6	Hakim	8
7	Kepala lembaga/kementerian	7
8	Komisioner	7
9	Duta besar	4
10	Lain-lain	41
	Jumlah	381

(disarikan dari Tempo, edisi 16-22 September 2013).

Banyaknya kasus korupsi di Era Reformasi dan banyaknya koruptor yang telah dan sedang ditangani oleh KPK dan divonis oleh pengadilan tipikor dan pengadilan umum (Pidum), menjadi alasan pentingnya melakukan penelitian mengenai pola perilaku korupsi di Indonesia dan pola penanganan kasus-kasus korupsi tersebut oleh KPK. Peneliti ingin mencari tahu tentang bagaimana pola-pola korupsi yang dilakukan oleh para pelaku

korupsi dan bagaimana KPK menangani kasus-kasus korupsi tersebut. Kedua hal tersebut perlu untuk dikaji untuk mendapatkan pemahaman tentang pola-pola korupsi dan pola-pola penanganannya. Pemahaman yang demikian dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memerangi korupsi.

Penelitian-penelitian tentang korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga anti-korupsi di Indonesia seperti ICW, Transparency Internal Indonesia (TII), Sugeng Surjady Syndicate (SSS), dan sejumlah lembaga lainnya menunjukkan adanya sejumlah variabel yang menyebabkan munculnya korupsi, antara lain variabel-variabel penegakan hukum yang lemah, para penegak hukum yang korup, birokrasi yang permisif, sistem politik yang tidak berjalan di atas rel yang benar, biaya politik yang tinggi, dan lain-lain. Ini berarti bahwa penyebab korupsi merupakan sesuatu yang bersifat eksternal. Variabel internalnya, yakni variabel psikologis, belum banyak diungkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengetahui gambaran psikologis para pelaku korupsi. Kami berasumsi bahwa perilaku, termasuk perilaku korupsi, dipengaruhi bukan hanya oleh faktor-faktor eksternal seperti penegakan hukum, sistem politik, ekonomi, dan lain-lain, tetapi juga oleh faktor internal atau psikologis seperti kepribadian (*personality*), motif (*motive*), persepsi (*perception*), *locus of control*, dll. Penelitian tentang persepsi dalam kaitannya dengan korupsi sudah pernah kami lakukan beberapa tahun silam (Abidin, A; Prathama, A. G., 2009; Abidin, A; Prathama, A. G., Purwono, U. 2011). Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tentang korupsi, persepsi tentang penegakan hukum, persepsi tentang norma sosial, dan persepsi tentang pemimpin berhubungan dengan perilaku korupsi.

Akan tetapi, penelitian tentang kepribadian (*personality*), motif (*motive*), dan *locus of control* dalam konteks perilaku korupsi belum pernah kami lakukan. Baru dalam penelitian ini kami bermaksud mengukur ketiga

variabel psikologis tersebut. Di beberapa negara lain, penelitian-penelitian sejenis pernah dilakukan. Misalnya, penelitian tentang trait-trait kepribadian yang dilakukan oleh Conelly & Ones (2008) di sejumlah negara menunjukkan bahwa negara-negara yang tingkat *neuroticism*-nya rendah dan *extraversion*-nya tinggi cenderung rendah tingkat korupsinya. Sedangkan *conscientiousness* hanya berhubungan dengan perilaku korupsi jika negara-negara tersebut sudah sejahtera. Penelitian tentang motif di level organisasi yang dilakukan oleh Wu & Huang Huang (2013) menunjukkan bahwa korupsi (dalam bentuk suap-menyuap) dapat terjadi dalam suatu organisasi yang memiliki motif untuk berprestasi (*achievement motive*) dan untuk berkuasa (*power motive*) lebih tinggi daripada motif untuk berafiliasi (*affiliation motive*). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Boshoff & Zyl (2011) tentang *locus of control* menunjukkan hasil yang tidak kalah menarik. Yakni, semakin internal *locus of control* individu, semakin tinggi perilaku etis individu tersebut, sehingga perilakunya jauh dari korupsi. Demikian juga, semakin otonom individu, semakin tinggi perilaku etisnya. Namun sebaliknya, semakin eksternal *locus of control*, semakin rendah perilaku etisnya, sehingga dapat terjerat perilaku korupsi.

Berdasarkan pada sejumlah temuan oleh lembaga-lembaga dan para peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang korupsi, dalam penelitian ini kami bukan hanya mengukur pola-pola korupsi di Indonesia dan pola-pola penanganannya oleh KPK, tetapi juga mengukur faktor-faktor psikologis seperti trait kepribadian, motif, dan *locus of control* dalam konteks perilaku korupsi.

1.2. Rumusan Permasalahan

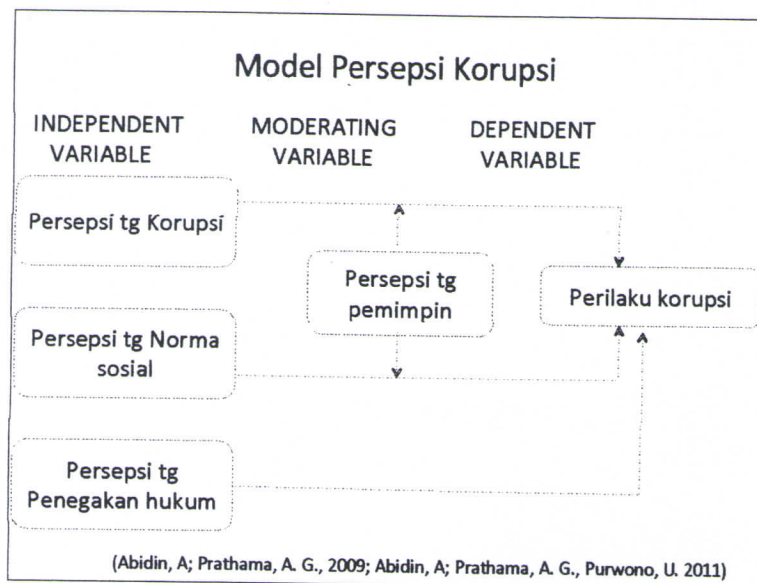
Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran psikologis para pelaku korupsi? Apakah ada kekhasan dalam struktur *traits* (kepribadian), motif, dan *locus of control* mereka?
2. Pola-pola seperti apa saja yang dilakukan oleh para pelaku korupsi dalam melakukan korupsi? Apakah pejabat, politisi, dan aparat penegak hukum yang terlibat korupsi memiliki pola korupsi yang sama atau berbeda?
3. Pola-pola seperti apa yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi tersebut? Apakah KPK memiliki metode atau pola tertentu dalam menangani korupsi? Apakah ada perbedaan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi tersebut (pejabat, politisi, dan penegak hukum)?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Hasil-Hasil Studi Awal Tentang Korupsi

Studi-studi kami terdahulu mengenai korupsi (Abidin, A; Prathama, A. G., 2009; Abidin, A; Prathama, A. G., Purwono, U. 2011) mengambil sampel para birokrat di 8 Kantor Pemerintahan Daerah Tingkat II Kota (Palangkaraya, Tegal, Solo, Kupang, Kendari, Jambi, Purwokerto, dan Mataram). Dari studi-studi tersebut ditemukan sejumlah fakta tentang peran faktor psikologis dalam mempengaruhi perilaku korupsi. Faktor psikologis yang dimaksud adalah persepsi tentang korupsi. Dari penelitian-penelitian tersebut terbukti bahwa persepsi tentang korupsi, persepsi tentang penegakan hukum, persepsi tentang norma sosial, dan persepsi tentang pemimpin berhubungan dengan perilaku korupsi. Jika dijelaskan secara visual, maka modelnya adalah seperti berikut ini (Gambar 1)



Untuk menjelaskan model di atas, perhatikan contoh berikut ini : Jika seorang birokrat mempersepsi bahwa suatu perilaku tertentu (katakanlah, menerima “amplop” dari seorang pengusaha yang sedang mengurus perizinan,

agar prosesnya dipercepat) bukan termasuk korupsi, lingkungan sosial pun dinilai tidak mengkategorikan perilaku itu korupsi, penegakan hukum pun dinilai tidak akan memberi hukuman jika menerima pemberian itu, dan pemimpin dinilai akan menerima pemberian itu jika ada dalam posisi yang sama, maka sang birokrat itu kemungkinan akan menerima “amplop” itu (jadi, dia akan melakukan korupsi).

Hasil penelitian tersebut mendapatkan justifikasi dari kajian Tavits (2005, p.2), yang menulis: “... *for both public officials and citizens, the decision to engage in corrupt behavior is primarily influenced by a personal definition of corruption and individual perceptions of how widespread corrupt activities are (imitation).*”

Dalam perkembangan pemikiran peneliti, ditopang oleh fakta-fakta empiris dan berita-berita media massa, peneliti menduga bahwa model di atas hanya dapat menjelaskan perilaku korupsi birokratik (*bureaucratic corruption*) atau *petty corruption*. Korupsi birokratik tidak mengandung unsur politik dan besaran uang yang diterima oleh para pelakunya tidak begitu besar. Meski bisa dilakukan secara kolektif, tetapi pelaku sering kali melakukannya secara sendiri-sendiri (*individual*). Hasil korupsinya pun tidak dipakai secara pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, partai politik, atau untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh sebab itu, model itu tidak dapat menjelaskan perilaku korupsi politik, yakni korupsi yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang mengandung unsur politik dan kekuasaan, dan besaran uang yang menjadi objek korupsinya relatif besar.

Berdasarkan alasan itu, sejak tahun 2012 peneliti coba melakukan kajian mengenai pola perilaku korupsi politik dan penangannya oleh KPK (Abidin, Z., 2013). Hasil studi menunjukkan bahwa sejumlah pelaku korupsi masing-masing memiliki pola korupsi yang berbeda, tergantung pada institusi atau lembaga tempat mereka berkarier. Misalnya, anggota DPR pada umumnya melakukan korupsi dalam bentuk menerima suap dan gratifikasi dari pengusaha dan pejabat pemerintah (Pemda dan Kementerian). Kewenangan mereka yang besar dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan, memungkinkan mereka memiliki banyak peluang untuk melakukan korupsi. Pola korupsi yang hampir sama ditemukan

dalam kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi, pegawai MA dan pengadilan, polisi). Namun, selain menerima suap dan gratifikasi, di antara mereka ada yang melakukan pemerasan terhadap sejumlah tersangka dan orang-orang yang sedang memiliki persoalan hukum. Ini dimungkinkan karena sebagai penegak hukum, mereka memiliki kekuatan dan otoritas hukum, sehingga memiliki peluang untuk melakukan intimidasi dan *show of power* terhadap orang-orang yang sedang terbelit perkara hukum.

Pola yang berbeda ditemukan dalam kasus-kasus korupsi di lingkungan birokrasi. Pada umumnya para pelaku di lingkungan ini (Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota) melakukan korupsi dalam beragam bentuk, diantaranya: penyalahgunaan anggaran (APBD) dan dana-dana pemerintah yang dikelola oleh mereka; menerima suap atau gratifikasi dari pengusaha. memberi suap atau gratifikasi kepada politisi (anggota DPR dan DPRD); bahkan, ketika mereka terjerat hukum, mereka memberi suap kepada aparat penegak hukum

Berdasarkan pada hasil penelitian pendahuluan tadi kami berasumsi bahwa perlu melakukan beberapa modifikasi jika penelitian lanjutan akan diteruskan, yakni:

Pertama, Menambah variabel-variabel psikologis, antara lain motif, *locus of control*, dan tipe atau *trait* kepribadian para pelaku korupsi. Perlu dijelaskan secara psikologis gambaran motif, *locus of control*, dan tipe kepribadian mereka. Sebagaimana diungkap oleh Kurt Lewin (dalam Baron, et.al, 2010), bahwa perilaku pada dasarnya merupakan fungsi dari individu dan lingkungan, atau $B = f(I + E)$. $B = behavior$, $I = individual$, dan $E = environment$. Dalam konteks korupsi berarti bahwa perilaku korupsi pada dasarnya bukan hanya merupakan fungsi dari lingkungan atau situasi, tetapi juga fungsi dari individu itu sendiri (antara lain: motif dan kepribadian), yakni sesuatu yang melekat dalam diri pelaku itu sendiri.

Kedua, menambah dan memperluas kasus-kasus korupsi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti perlu mengidentifikasi lebih banyak lagi kasus yang telah ditangani oleh KPK. Penelitian pendahuluan baru menggambarkan sebagian kecil kasus dan hanya melibatkan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota-

anggota DPR, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan aparat penegak hukum. Padahal, ada pelaku-pelaku lain yang berasal dari kalangan bisnis, pejabat tinggi, komisioner, DPRD, dan lain-lain.

Ketiga, menambah sumber data yang bukan hanya berasal dari media massa, tapi juga dari interviu dengan para pelaku korupsi dan dengan penyidik dan pimpinan KPK yang menangani kasus-kasus korupsi. Ini perlu mengingat ada banyak fakta yang tidak terungkap oleh media massa, dan peneliti memerlukan data empirik langsung dari tangan pertama atau kedua, tanpa dimediasi oleh teks (yakni, berita dari media massa).

2.2. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptus* atau *corrumpere*, yang artinya: menyalahgunakan, menyimpang, menghancurkan, atau mematahkan. Makna kata korupsi, dengan demikian, memang negatif, bersifat destruktif dan merugikan. Ada penyimpangan dan penyalahgunaan, yakni penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau meningkatkan dan memperluas kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa banyak definisi tentang korupsi mengacu pada penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Misalnya definisi yang dirumuskan oleh Collin Nye, bahwa korupsi merupakan "*behaviour which deviates from the formal duties of a public role because of private- regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise of certain types of private-regarding influence*" (Nye 1967:417). Mushtaq Khan mendefinisikan korupsi sebagai "*behaviour that deviates from the formal rules of conduct governing the actions of someone in a position of public authority because of private-regarding motives such as wealth, power, or status*" (Khan 1996:12).

Definisi lain ditulis oleh Voy sbb: "*Corruption is the use of power for profit, preferment, or prestige, or for the benefit of a group or class, in a way that constitutes a breach of law or of standards of high moral conduct.*" (Voy, 1970)". Definisi ini serupa dengan yang dibuat oleh World Bank. Pada tahun

2000 World Bank mendefinisikan korupsi sebagai berikut: *corruption is the abuse of public power for private benefit*. (the World Bank, 2000). Definisi yang dirumuskan oleh World Bank tersebut seolah menjadi standar internasional untuk merumuskan korupsi. Sejumlah penulis dan peneliti tentang korupsi biasanya mendefinisikan korupsi sebagai "... *the misuse of public office for private gain* (Klitgaard et. al., 2000; Svensson, 2005)

Definisi-definisi di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa korupsi paling tidak memiliki 4 komponen, yakni (1) ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, (2) dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, (3) merupakan pelanggaran hukum atau penyimpangan moral, dan (4) terjadi dalam *public office setting*.

Yang dimaksud dengan *public office setting* bukan hanya kantor-kantor birokrasi pemerintahan eksekutif, tetapi juga termasuk legislatif, yudikatif, partai-partai politik, lembaga-lembaga hukum, dan perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya, di perusahaan-perusahaan swasta para pengusaha memberi suap kepada para pejabat, politisi, dan aparat penegak hukum untuk mempermudah dan memperlancar usaha mereka. Di partai-partai politik para politisi bekerja sama dengan pejabat pemerintah dan perusahaan swasta melakukan korupsi untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Dalam sistem peradilan para hakim, jaksa, polisi, pembela, dan petugas-petugas pengadilan meminta dan menerima suap dari terdakwa kasus-kasus kriminal dan korupsi, dengan imbalan pembebasan atau keringanan hukuman.

2.2.1. Korupsi Politik

Sedikitnya terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelaku korupsinya. Pertama, *bureaucratic corruption*. Dinamakan *bureaucratic corruption* karena settingnya adalah di lingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat. Begovic (2005) menyebut jenis korupsi ini *administrative corruption*. Karena pelaku korupsi birokratis ini mayoritas adalah pegawai atau birokrat kecil, maka jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption* (korupsi kelas teri). *Petty corruption* adalah

suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para pegawai rendah dengan cara antara lain mencuri properti kantor dan menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota masyarakat. Para pelakunya antara lain pegawai kecil di lingkungan pemerintah atau polisi lalu lintas yang bertugas di jalan raya. Meski uang yang diminta dan diterima relatif kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak petugas, maka jumlahnya menjadi sangat besar. Di samping itu, korbannya pun biasanya adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat kecil (kelas menengah ke bawah), sehingga jumlah uang yang harus dibayar oleh mereka, sangat berarti buat mereka. Oleh sebab itu, korupsi jenis ini termasuk merusak, karena dapat menurunkan kredibilitas lembaga atau departemen pemerintah, menghilangkan kepercayaan kepada penegakan hukum (Khan, M.H. 2006), dan menyusahkan serta merugikan rakyat kecil.

Jenis korupsi kedua adalah *political corruption*. Disebut *political corruption* karena pelakunya melibatkan para politisi di parlemen (DPR dan MPR), para pejabat tinggi di pemerintahan, dan para penegak hukum. Alkotsar (2008) mendefinisikan korupsi politik sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik, baik karena dipilih maupun ditunjuk. Kedudukan politik yang ditempati oleh para pelaku antara lain presiden, menteri, gubernur, anggota parlemen, komisioner, jaksa, hakim, dan lain-lain. Akan tetapi, pada prakteknya, perilaku korupsi mereka seringkali melibatkan para pengusaha. Keterlibatan para pengusaha dalam praktek korupsi politik karena kepentingan mereka dalam mengembangkan dan memperluas usaha mereka. Untuk merealisasikan hal itu mereka memerlukan kekuatan politik dan hukum (yang dimiliki oleh para pejabat, politisi, dan aparat penegak hukum).

Korupsi politik sering disebut juga *grand corruption* (korupsi kelas kakap), yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Garapan atau sasaran korupsinya adalah proyek-proyek besar dan kontrak-kontrak penting. Korupsi tingkat tinggi ini disebut juga "kroniism", karena melibatkan *kongkalikong* antara para pengusaha besar dan pejabat atau politisi. Para pengusaha memberi suap atau gratifikasi dalam jumlah besar

kepada para politisi dan pejabat, agar mereka menyusun kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan para pemberi suap atau gratifikasi. Akibatnya, kebijakan-kebijakan pemerintah selalu menguntungkan para pengusaha dan negara serta masyarakat dirugikan dalam jumlah besar. Misalnya, kebijakan tentang alih fungsi hutan yang merusak alam dan menimbulkan konflik sosial. Oleh sebab itu, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi jenis ini sangat besar dan luas. Bukan saja negara dirugikan dan para pelaku diuntungkan secara pribadi dan kelompok, tapi juga kerugian pada masyarakat secara keseluruhan. Kualitas suatu proyek menjadi sangat buruk karena korupsi yang dilakukan oleh mereka, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat jadi berkurang karena kebijakan yang seringkali merugikan masyarakat luas tapi menguntungkan golongan masyarakat tertentu. Kerusakan lingkungan pun besar, tapi pengusaha tidak ditindak karena pemerintah sudah mendapatkan upeti dari mereka.

Namun, di Indonesia batas antara *petty corruption* (atau *bureaucratic corruption*) dan *grand corruption* (atau *political corruption*) bisa sangat tipis. Contohnya kasus fenomenal korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, yang ditangani oleh KPK. Baik Gayus maupun Dhana adalah pegawai pajak golongan III/a yang baru beberapa tahun bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Pajak Jakarta. Akan tetapi, jumlah uang yang menjadi objek korupsi mereka relatif besar. Jumlah uang yang dikorupsi oleh Gayus di atas 100 milyar rupiah, dan oleh Dhana 60 milyar rupia. Ditinjau dari posisi atau jabatannya, yakni sebagai birokrat atau pegawai negeri rendah, mereka dapat dikategorikan sebagai *petty corruptor*, tapi jika dilihat dari besaran uang yang dikorupsi oleh mereka, dapat dikelompokkan sebagai *grand corruptor*. Oleh sebab itu, tidak heran jika KPK ikut terlibat menangani kedua pegawai pajak tersebut, karena prioritas KPK adalah menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap (*grand corruption*) yang jumlah kerugian negaranya di atas Rp 1 Milyar yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum (Laporan Tahunan KPK 2011). Sebagai penyelenggara negara dan jumlah kerugian negara di atas Rp 1 milyar, maka kedua pegawai pajak itu ditangani KPK

2.2.2. Korupsi Menurut UU Anti-Korupsi

Di Indonesia sebetulnya telah ada rumusan hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan atau memberi batasan tentang korupsi. UU yang dimaksud adalah UUNo 31 tahun 1991 jo UU No 20 Tahun 2001. Menurut UU ini terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 7, yaitu:

1. Kerugian keuangan Negara, yaitu “melakukan penyalahgunaan dan penggelapan barang atau harta benda milik negara sehingga menyebabkan kerugian negara.” Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh para birokrat/pejabat dan politisi, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibatnya, secara langsung negara dan masyarakat dirugikan karena perbuatan mereka tersebut.
2. Suap menyuap, yaitu menerima atau memberi hadiah dan janji agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan pihak yang memberi suap. Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan dan seringkali bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang memberi suap.
3. Penggelapan dalam jabatan, antara lain “melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara negara” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis antara lain adalah birokrat/pejabat yang melakukan manipulasi pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.
4. Pemerasan, yaitu “memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan”, sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau permintaan itu. Pada prakteknya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau

terancam.

5. Perbuatan curang, yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihanannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu “turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan”. Jenis tindakan koruptif ini antara lain berupa penunjukan perusahaan milik sendiri, teman, atau keluarga yang tidak didasarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).
7. Gratifikasi, yaitu menerima hadiah, meski diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2.2.3. Sebab-sebab Korupsi

Klitgaard (1998) mendefinisikan korupsi dalam bentuk rumus berikut : $C = M + D - A$. Maksudnya, Korupsi ($C = corruption$) terjadi karena adanya monopoli ($M = monopoly$) dan kewenangan ($D = discretionary power$), serta minimnya akuntabilitas ($A = accountability$). Dengan perkataan lain, semakin besar monopoli dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, tapi semakin kecil akuntabilitas yang dimiliki oleh orang itu, maka semakin besar kemungkinan dia melakukan korupsi. Rumus ini bukan hanya berlaku secara individual, tapi juga secara institusional.

Yang dimaksud dengan monopoli bukan hanya dalam hal ekonomi, tapi juga politik dan hukum (monopoli politik dan monopoli hukum). Misalnya, anggota parlemen bukan hanya memiliki wewenang, tapi juga monopoli, antara lain dalam hal pengesahan anggaran keuangan dan undang-undang. Kepolisian memiliki monopoli dalam menangani perkara kriminal. Hakim memiliki

monopoli dalam memutuskan perkara hukum di pengadilan. Maka, jika akuntabilitas mereka rendah, besar kemungkinan mereka melakukan korupsi.

Dalam definisi atau rumus yang ditulis oleh Klitgaard tadi terkandung faktor-faktor penyebab munculnya korupsi, yakni adanya monopoli (baik ekonomi maupun politik), kewenangan atau kekuasaan (yang mudah disalahgunakan), dan minimnya akuntabilitas. Dengan demikian, untuk menghilangkan atau menghapus korupsi, maka kurangi monopoli, kontrol kewenangan, dan tingkatkan akuntabilitas seorang pemimpin atau suatu lembaga. Apa yang dikemukakan oleh Klitgaard ini masuk akal. Akan tetapi, apakah penyebab korupsi memang sesederhana itu, sehingga penanganannya pun dapat dilakukan secara relatif sederhana?

Kenyataannya, penyebab munculnya korupsi jauh lebih kompleks dibandingkan yang dikemukakan oleh Klitgaard. Sejumlah faktor diduga kuat dapat mendorong individu melakukan korupsi. Faktor-faktor tersebut baik bersifat ekonomi maupun non-ekonomi (Rose-Ackerman, S. ed., 2006). Faktor-faktor non-ekonomi diantaranya adalah: sosial, sejarah, politik, budaya, hukum, psikologi, agama, dan lain-lain.

Berikut akan dideskripsikan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan korupsi, sebagaimana disinyalir oleh Lambsdorff (2008).

1. *Size of public sector*. Banyaknya departemen-departemen pemerintah menyebabkan bukan hanya inefisiensi tetapi juga pembengkakan jumlah pegawai atau birokrat. Akibatnya, selain alokasi anggaran negara tersedot ke dalam belanja dan gaji pegawai, gaji birokrat dan pejabat pun menjadi rendah, sehingga kinerja mereka menjadi buruk. Dalam kondisi demikian, ada peluang dan dorongan bagi birokrat dan pejabat untuk melakukan korupsi. Ada korelasi antara rendahnya gaji pegawai dengan korupsi (Svenson, 2005). Kebutuhan ekonomi para birokrat makin hari makin meningkat sejalan dengan bertambahnya anggota keluarga mereka (istri atau suami dan anak-anak), sedangkan gaji mereka tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi ini dapat mendorong para birokrat melakukan korupsi.

2. *Regulatory quality*. Peraturan pemerintah yang buruk memungkinkan peluang untuk korupsi. Peraturan-peraturan yang mewajibkan Intervensi pemerintah kepada sektor-sektor tertentu yang kurang relevan dan tidak perlu, membuka peluang bagi para birokrat untuk melakukan korupsi, misalnya dalam bentuk penyuapan dan gratifikasi.
3. *Lack of economic competition*. Kompetisi mendorong pemerintah untuk memperhatikan kualitas produk/layanan, bukan pada imbalan pribadi. Kurangnya atau tidak adanya kompetisi membuat birokrat cepat puas diri. Oleh sebab itu, perlu diciptakan kompetisi dalam birokrasi agar terjadi persaingan sehat dalam pelayanan publik dan kinerja birokrasi, dan terhindar dari dorongan untuk melakukan korupsi.
4. *Government structure*. Demokrasi dapat menurunkan korupsi, meski tidak secara langsung, dan harus melalui proses yang cukup panjang. Meski demikian, struktur pemerintah yang demokratis menjadi salah satu syarat untuk meminimalisir korupsi, dibandingkan struktur pemerintahan yang non-demokratis
5. *Forms of democratisation*. Demokrasi parlementer lebih efektif dalam menurunkan korupsi dibandingkan demokrasi presidensial yang *powerful*. Dalam demokrasi parlementer, kontrol atas jalannya pemerintahan dilakukan secara kelompok (parlemen), sedangkan dalam demokrasi presidensial peran pemerintah dikendalikan oleh seorang presiden, yang seringkali dimanfaatkan oleh kroni-kroninya, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya menjadi korup.
6. *Voting system*. Persaingan diantara para politisi untuk merebut kekuasaan mendorong mereka menjadi lebih berkualitas, lebih kreatif, tapi juga dapat memicu korupsi. Untuk meraih kekuasaan, para politisi sering menggunakan uang untuk membeli suara, demikian juga untuk mempertahankannya. Pesaingnya pun melakukan hal yang sama untuk merebut kekuasaan
7. *Decentralization*. Desentralisasi dapat menjadi alat untuk menurunkan korupsi karena dapat mendorong pemerintah untuk lebih dekat dengan rakyat dan rakyat dapat mengontrol langsung kinerja pemerintah. Sejumlah

peneliti seperti Root (1999), Treisman (1999), dan Fisman dan Gatti (2002) menunjukkan adanya korelasi antara korupsi dan jumlah populasi suatu wilayah. Semakin kecil suatu wilayah pemerintahan, semakin kurang tingkat korupsinya.

8. *Culture*. Reformasi tidak akan berperan banyak jika kultur yang dapat mendorong korupsi tetap dipertahankan. Salah satu unsur yang terdapat dalam kultur korupsi adalah kepercayaan (*trust*) dan penerimaan terhadap hirarki. Tingkat kepercayaan yang rendah dapat meningkatkan korupsi, karena tidak mendorong terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh La Porta, dkk (1995) di 33 negara menunjukkan adanya korelasi antara kepercayaan (*trust*) dengan tingkat korupsi. Kepercayaan dapat mencegah korupsi karena para birokrat dapat bekerjasama secara lebih baik dengan masyarakat. Hoffstede (1997) menunjukkan bahwa semakin lebar *power distance* antar anggota masyarakat atau antara rakyat dan pemerintah, semakin besar tingkat korupsi. Power yang tidak terdistribusi secara merata mendorong korupsi. Penerimaan terhadap hirarki, juga mendorong korupsi. Pengakuan bahwa kelompok tertentu ditakdirkan menjadi pemimpin dan kelompok lain sebagai bawahan, menjadikan masyarakat apatis dan toleran terhadap korupsi yang dilakukan oleh pimpinan tersebut.
9. *Values*. Nilai-nilai tradisional seperti "*familiism*" mendorong korupsi (Lipset dan Lenz, 2000). Karena alasan keluarga, rekrutmen pegawai atau birokrat tidak didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi karena kekerabatan. Kenaikan jabatan atau pangkat tidak didasarkan pada kualitas kerja, tetapi karena persaudaraan atau pertemanan. Demikian juga dalam pemenangan tender untuk suatu proyek -- dalam kondisi seperti itu, korupsi menjadi sangat besar peluangnya.
10. *Gender*. Penelitian yang dilakukan oleh Swami dkk (2001) dan Dollar dkk (2001) di 66 negara menunjukkan bahwa persentase perempuan di dunia kerja dan di parlemen memiliki efek negatif terhadap korupsi. Artinya, lembaga-lembaga yang didominasi oleh laki-laki sangat besar

kemungkinannya untuk lebih korup dibandingkan dengan lembaga-lembaga di mana jumlah dan peran perempuan relatif besar.

11. *Geography and history*. Melimpahnya sumber daya alam secara signifikan berkorelasi dengan tingkat korupsi. Sumber daya alam yang kaya menyebabkan masyarakat kurang dapat menghargai kerja keras (malas) dan suka mencari jalan pintas. Demikian juga dengan sejarah kolonialisme. Negara-negara bekas jajahan tertentu berkorelasi dengan korupsi. Negara-negara bekas jajahan Inggris relatif lebih bersih dari korupsi dibandingkan bekas jajahan negara-negara seperti Spanyol, Jerman, Perancis, atau Belanda.

Selain sebab-sebab yang dikemukakan oleh Lambsdorff (2008) di atas, terdapat sebab lainnya yang sangat vital, yakni penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak konsisten, mendorong orang melakukan korupsi. Para pelaku korupsi berpikir bahwa jika hukum penagakannya tidak tegas dan tidak konsisten, maka peluang mereka tertangkap kecil, dan keuntungan (*reward*) yang akan diperoleh oleh mereka jauh lebih besar dibandingkan kerugian (*punishment*) yang bakal diterima. Oleh sebab itu, perlu penegakan hukum yang berat, tegas, dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat mengurangi atau bahkan menghapus korupsi karena efek jera (*deterrent effect*) yang diakibatkan oleh hukuman tersebut.

2.2.4. Sebab-sebab Psikologis Munculnya Korupsi: *Traits* Kepribadian, Motivasi, dan *Locus of Control*

Sebab-sebab korupsi sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebab-sebab yang bersifat non-psikologis. Faktor-faktor non-psikologis pada umumnya adalah bersifat eksternal, di luar diri individu atau pelaku. Para pelaku melakukan korupsi karena pengaruh faktor-faktor eksternal tadi.

Akan tetapi, korupsi dapat dipahami juga dari perspektif psikologis, artinya dipahami dari faktor-faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku. Sebetulnya,

terdapat sejumlah kajian psikologis tentang bagaimana faktor-faktor psikologis dapat memunculkan korupsi. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dkk di lingkungan birokrasi (Abidin & Prathama, 2009; Abidin, Prathama, Purwono, 2011) menunjukkan peran psikologis khususnya persepsi dalam mendorong korupsi di level birokrasi. Misalnya, persepsi positif terhadap suatu perilaku koruptif dapat mendorong pegawai negeri untuk melakukan perilaku koruptif yang dipersepsi positif itu. Sebaliknya, jika perilaku koruptif itu dinilai negatif, maka persepsi itu dapat menghambat mereka untuk melakukan korupsi. Persepsi-persepsi lainnya misalnya terhadap penegakan hukum, norma sosial, dan pemimpin pun berhubungan dengan perilaku korupsi, yakni bisa mendorong atau menghambat perilaku korupsi, tergantung pada positif atau negatifnya persepsi mereka.

Selain itu, terdapat sejumlah penelitian lainnya tentang korupsi dalam perspektif psikologis. Misalnya, eksperimen yang dilakukan oleh Wu & Huang (2013) di level organisasi. Mereka membuktikan bahwa suap-menyuap (yang merupakan salah satu bentuk dari korupsi) dipengaruhi secara signifikan antara lain oleh motivasi. Menggunakan teori motivasi dari McClelland, Wu & Huang (2013) membuktikan bahwa suap-menyuap dapat terjadi dalam suatu organisasi yang memiliki motif untuk berprestasi dan untuk berkuasa lebih tinggi daripada motif untuk berafiliasi.

Riset lain yang dilakukan oleh Conelly & Ones (2008) di level negara menunjukkan hubungan yang signifikan antara kepribadian dengan perilaku korupsi. Menggunakan teori *the big five personality* dari McCrae & Costa (1992), mereka menunjukkan antara lain bahwa terdapat hubungan antara tipe-tipe kepribadian dengan korupsi. Misalnya, di negara-negara yang tingkat *neuroticism*-nya rendah dan *extraversion*-nya tinggi cenderung rendah tingkat korupsinya. Namun, hubungan antara *conscientiousness* dengan korupsi hanya dapat diperantarai oleh variabel kesejahteraan (*wealth*). Artinya, suatu negara yang tingkat *conscientiousness*-nya tinggi cenderung tingkat korupsinya rendah jika negara itu secara ekonomi sejahtera.

Riset berikutnya dilakukan Boshoff & Zyl (2011) tentang hubungan antara *locus of control* dengan perilaku etis, termasuk perilaku korupsi di lingkungan bisnis. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin internal *locus of control* para karyawan, semakin tinggi perilaku etis mereka. Sebaliknya, semakin eksternal *locus of control*, semakin rendah perilaku etis mereka.

Sejalan dengan hasil penelitian Wu & Huang (2013), Conelly & Ones (2008), dan Boshoff & Zyl (2011), dalam penelitian ini peneliti antara lain akan mengukur variabel-variabel kepribadian, motivasi, dan *locus of control*. Tujuannya adalah untuk memahami gambaran atau profile kepribadian, motivasi, dan *locus of control* para pelaku korupsi. Berikut adalah deskripsi singkat tentang ketiga variabel psikologis tersebut

1. **Kepribadian**

Gordon Alport (dalam Carver & Scheier, 2004, 5) mendefinisikan kepribadian berikut ini: "*Personality is a dynamic organization, inside the person, of psychophysical systems, that create the person's characteristic pattern of behavior, thought, and feelings*". Sedangkan, Pervin, Cervone, & John (2005, p.6) menulis bahwa, "*personality refers to those characteristics of the person that account for consistent patterns of feelings, thinking, and behavior.*"

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan sejumlah sifat yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Sifat-sifat tersebut bersifat menetap dan biasanya konsisten dalam mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan perasaan kita.

Para psikolog meyakini bahwa kepribadian terdiri dari unit-unit dasar yang disebut *trait*. Unit-unit tersebut merupakan disposisi-disposisi yang melekat pada individu dan mempengaruhi cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku individu. Terdapat 5000 kata lebih dalam Bahasa Inggris yang biasa digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kepribadian manusia (Pervin, Cervone, & John, 2005). Oleh Cattell sifat-sifat tersebut disaring menjadi 16 kata sifat, dan oleh Eysenck menjadi 3 sifat atau *trait*. 16 kata sifat hasil penyaringan Cattell adalah (1)

Abstractedness: Imaginative versus Practical, (2) Apprehension: Worried versus Confident, (3) Dominance: Forceful versus Submissive, (4) Emotional Stability: Calm versus High strung, (5) Liveliness: Spontaneous versus Restrained, (6) Openness to Change: Flexible versus Attached to the Familiar, (7) Perfectionism: Controlled versus Undisciplined, (8) Privatness: Discreet versus Open, (9) Reasoning: Abstract versus Concrete, (10) Rule Consciousness: Conforming versus Non-conforming, (11) Self-Reliance: Self-sufficient versus Dependent, (12) Sensitivity: Tender-hearted versus Tough-minded, (13) Social Boldness: Uninhibited versus shy, (14) Tension: Impatient versus Relaxed, (15) Vigilance: Suspicious versus trusting, (16) Warmth: Outgoing versus Reserved. Sedangkan 3sifat menurut Eysenck adalah *Extraversion, Neuroticism* and *Psychoticism* (dalam Pervin, Cervone, & John, 2005).

Dalam perkembangannya, setelah dikembangkan oleh Goldstein dan McCrae & Costa, sifat-sifat itu menjadi 5 buah, sehingga diberi nama *the big five personality*. Riset-riset tentang kepribadian sejak tahun 1990-an hingga kini sering menggunakan teori kepribadian yang disebut *the big five personality* itu. Oleh McCrae & Costa (2006), sifat-sifat tersebut diberi nama *domain*. Kelima sifat atau domain tersebut, untuk memudahkan mengingatnya, dinamakan juga *OCEAN*, yakni singkatan dari *Openness to experience (O)*, *Conscientiousness (C)*, *Extraversion (E)*, *Agreeableness (A)*, dan *Neuroticism (N)*. Kelima domain tersebut masing-masing memiliki 6 ciri yang spesifik yang oleh Costa & McCrae (2006) disebut *facet*, yakni ciri-ciri yang spesifik yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari domain-domain kepribadian tersebut.

No	Traits (Domains)	Facets	Keterangan
1	<i>Agreeableness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tender-mindedness</i> - <i>Modesty</i> - <i>Compliance</i> - <i>Altruism</i> - <i>Straight-forwardness</i> - <i>Trust</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tender-mindedness</i> adalah perasaan mudah tersentuh oleh derita orang lain, memiliki dorongan untuk membantu orang lain tanpa memikirkan keuntungan ekonomi • <i>Modesty</i> adalah sikap dan perilaku yang sederhana, tidak suka pamer • <i>Altruism</i> adalah kecenderungan untuk membantu orang lain tanpa mementingkan diri sendiri • <i>Compliance</i> adalah sifat-sifat lembut dan hormat terhadap orang lain, dan tidak menentang atau menantang opini atau perilaku orang lain • <i>Straight-forwardness</i> adalah terus terang, jujur, tidak ada agenda tersembunyi • <i>Trust</i> adalah percaya pada hal-hal terbaik yang ada pada orang lain dan jarang memiliki prasangka-prasangka negatif terhadap orang lain
2	<i>Neuroticism</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anxiety</i> - <i>Hostility</i> - <i>Depression</i> - <i>Self-consciousness</i> - <i>Impulsiveness</i> - <i>Vulnerability</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anxiety</i> merupakan perasaan nervous, tegang, strung, mudah merasa khawatir • <i>Hostility</i> merupakan disposisi untuk gampang marah, ill tempered, irritable • <i>Depression</i> merupakan disposisi untuk mengalami kesedihan, merasa tidak ada harapan, dan kesepian • <i>Self-consciousness</i> mencakup perasaan malu, merasa rendah diri, ill tempered • <i>Impulsiveness</i> merupakan kecenderungan untuk menyerah pada godaan dan dikuasai oleh banyak keinginan, dan kurang bisa mengendalikan diri • <i>Vulnerability</i> adalah ketidakmampuan menangani stres, mudah panik, tergantung pada bantuan orang lain
3	<i>Extraversion</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Warmth</i> - <i>Gregariousness</i> - <i>Assertiveness</i> - <i>Activity</i> - <i>Excitement-seeking</i> - <i>Positive emotion</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Warmth</i> menunjuk pada gaya interaksi yang bersahabat, ramah, mudah terlibat dan hangat kepada orang lain • <i>Gregariousness</i> adalah keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk bersosialisasi dengan orang lain • <i>Assertiveness</i> memiliki kemudahan mengambil alih, menyatakan pendapat pribadinya secara jelas, mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran. • <i>Activity</i> menunjuk pada banyaknya aktivitas, sibuk, bertindak dan bicara secara cepat, enerjik, forceful.

- | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| 4 | <i>Openness to experience</i> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fantasy,</i> - <i>Aesthetic</i> - <i>Feelings</i> - <i>Action,</i> - <i>Ideas,</i> - <i>Values,</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Excitement seeking</i> adalah kecenderungan untuk mencari lingkungan yang dapat menimbulkan gairah, menegangkan, mendebarkan • <i>Positive emotion</i> adalah tendensi untuk mencari dan menemukan kesenangan, antusiasme, cinta • <i>Fantasy</i> adalah kecenderungan untuk berimajinasi dan mengelaborasi mimpi-mimpi • <i>Aesthetic</i> adalah kemampuan mengapresiasi atau menciptakan seni dan keindahan • <i>Feeling</i> adalah kemampuan menilai pengalaman dan memaknainya sebagai sumber makna bagi kehidupan • <i>Action</i> adalah dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru • <i>Idea</i> adalah keinginan yang kuat untuk mengetahui (<i>curiosity</i>) dan mengembangkan ide-ide • <i>Value</i> adalah kemampuan untuk memikirkan nilai-nilai dan terbuka pada segenap nilai, sehingga tidak kaku (<i>rigid</i>), melainkan cenderung fleksibel dan bebas dalam mengevaluasi nilai-nilai kehidupan (sosial, politik, agama, budaya) |
| 5 | <i>Conscientiousness</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Competence</i> <i>Order</i> <i>Dutifulness</i> <i>Achievement</i> <i>Self-discipline</i> <i>Deliberation</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Competence</i> adalah kemampuan dan skill yang dimiliki oleh individu. Individu yakin akan kemampuannya • <i>Order</i> adalah keteraturan dan konsistensi dalam mengerjakan sesuatu sehingga pekerjaannya jadi efisien • <i>Dutifulness</i> adalah dorongan untuk berperilaku berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral, sehingga dapat dipercaya • <i>Achievement</i> adalah kecenderungan untuk meraih yang terbaik, yang ekselens • <i>Self-discipline</i> adalah perilaku yang sangat disiplin • <i>Deliberation</i> adalah perencanaan dan pemikiran yang hati-hati sebelum bertindak |

Neuroticism. Meminjam penjelasan yang dibuat oleh Vestre, McCrae & Costa (2006) mendefinisikan *neuroticism* sebagai, “... *the proneness of the individual to experience unpleasant and disturbing emotions and to have corresponding disturbances in thought and actions*” (p.46). Individu-individu yang

memiliki tingkat neurotisme tinggi pada umumnya sering mengasihani diri sendiri, pencemas, kurang mempercayai orang lain, depresif, kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial secara positif, merasa tidak berdaya, rentan terhadap perubahan atau reaksi lingkungan (Costa & McCrae, 1988). Sebaliknya, individu-individu yang memiliki skor *neurotism* rendah memiliki ciri-ciri tenang, rileks, merasa aman, puas dengan dirinya, tidak emosional, mampu bertahan dalam kondisi yang sulit.

Conscientiousness adalah salah satu dimensi kepribadian yang ditandai oleh ciri-ciri seperti: efisien, *organized*, dapat dipercaya, terencana, cermat, bertanggung jawab, berorientasi pada prestasi, produktif, mampu menunda kepuasan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan (McCrae & Costa, 2006). Individu-individu yang memiliki skor tinggi dalam *conscientiousness* pada umumnya sangat dutiful dan disiplin, dapat dipercaya, tidak mudah putus asa, disiplin, ambisius dan kerja keras, bahkan sebagian dari mereka “kecanduan kerja” (*work aholic*). Sebaliknya, individu-individu yang skor *conscientiousness*-nya rendah dicirikan oleh malas, tidak memiliki tujuan, ceroboh, hedonis, tidak dapat dipercaya, kurang memiliki kemauan, loyo.

Extraversion. Ciri utama dari *extraversion* adalah ambisi dan kemampuan bersosialisasi. Individu yang memiliki tingkat ekstraversi tinggi dilukiskan sebagai orang yang suka bersosialisasi, aktif (suka) bicara, agresif, enerjik, antusias, asertif, dan optimistik. Mereka mencari hal-hal yang excited, aktif dan impulsif, dan memiliki keinginan untuk diakui secara sosial, untuk dipuji, untuk memiliki status, *exhibition*, dan kekuasaan (Costa & McCrae, 1988). Menurut Goldberg (1990), individu-individu extravert berusaha keras untuk mendapatkan posisi-posisi kekuasaan dan status, dan sangat mungkin berhasil mendapatkan yang mereka inginkan itu karena mereka memiliki *performance* dan skill sosial yang tinggi. Sebaliknya, individu-individu yang memiliki tingkat *extraversion* rendah ditandai oleh sifat-sifat diam, berorientasi pada tugas, tidak bersemangat, tertahan dalam mengungkapkan perasaan atau pikiran, tidak bersahabat.

Agreeableness. Menurut McCrae & Costa (2006), *agreeableness* merupakan perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri terhadap orang lain,

percaya pada itikad baik orang lain, baik hati, fleksibel, memaafkan, suka kerja sama, bersahabat, matang, baik hati, penolong, dan altruistik. Sebaliknya, individu-individu yang memiliki tingkat agreeableness rendah ditandai oleh sifat-sifat sinis, kasar, berprasangka, tidak kooperatif, pendendam, manipulatif, tidak berperasaan.

Openness to experience adalah kemampuan untuk menyerap ide-ide, pendekatan-pendekatan, dan percobaan-percobaan baru (McCrae & Costa, 2006). Individu-individu yang memiliki skor tinggi dalam *openness* ditandai oleh sifat-sifat seperti imajinatif, berbudaya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, orisinal, berwawasan luas, cerdas, artistik (Costa & McCrae, 1992). Sebaliknya, individu-individu yang memiliki tingkat *openness* rendah ditandai oleh sifat-sifat konvensional, *down-to-earth*, memiliki minat yang dangkal, tidak memiliki apresiasi seni, tidak mampu berpikir analitik.

Secara ringkas, Costa & McCrae menjelaskan kelima trait tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Ciri-ciri *Traits* dalam *The Big Five Personality*

Characteristics of the high scorer	Traits scales	Characteristics of the low scorer
	NEUROTISM (N)	
Worrying, nervous, emotional, insecure, inadequate, hypochondriacal	Assess adjustment vs. emotional instability. Identifies individuals prone to psychological distress, unrealistic ideas, excessive cravings or urges, and maladaptive coping responses	Calm, relaxed, unemotional, hardy, secure, self-satisfied
	EXTRAVERSION (E)	
Sociable, active, talkative, person-oriented, optimistic, fun-loving, affectionate	Assess quantity and intensity of interpersonal interaction; activity level; need for stimulation; and capacity for joy	Reserved, sober, unexuberant, aloof, task-oriented, retiring, quiet
	OPENNES (O)	
Curious, broad interests, creative, original, imaginative, untraditional	Assess proactive seeking and appreciation of experience for its own sake; toleration for and exploration of the unfamiliar	Conventional, down-to-earth, narrow interests, unartistic, unanalytical
	AGREEABLENESS (A)	
Soft-hearted, good-natured, trusting, helpful, forgiving, gullible, straightforward	Assess the quality of one's interpersonal orientation along a continuum from compassion to antagonism in thoughts, feelings, and actions	Cynical, rude, suspicious, uncooperative, vengeful, ruthless, irritable, manipulative
	CONSCIENTIOUSNESS (C)	
Organized, reliable, hard-working, self-disciplined, punctual, scrupulous, neat, ambitious, persevering	Assess the individual's degree of organization, persistence, and motivation in goal-directed behavior. Contrast dependable, fastidious people with those who are lackadaisical and sloppy	Aimless, unreliable, lazy, careless, lax, negligent, weak-willed, hedonistic

(Sumber: Costa & McCrae, 1992, dalam Pervin, Cervone, & John, 2005, p. 255)

Menurut hasil riset Conelly & Ones (2008), negara-negara yang tingkat *neuroticism*-nya rendah dan *extraversion*-nya tinggi cenderung rendah tingkat korupsi. Sedangkan *conscientiousness* hanya berhubungan dengan perilaku korupsi jika negara-negara tersebut sudah sejahtera.

2. Motivasi

Motivasi atau motif adalah suatu energi dalam diri manusia yang menggerakkan, mengarahkan, dan menentukan perilaku (Cottam, dkk., 2004). Sebagian besar perilaku manusia, baik yang disadari maupun tidak disadari, sedikit banyak dipengaruhi oleh motivasi. Demikian pula halnya dengan perilaku korupsi. Menurut teori-teori motivasi sebagaimana dikemukakan oleh Wu dan Huang, 2013, suatu perilaku (termasuk perilaku korupsi) terjadi karena si pelaku memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan perilaku (korupsi) tersebut.

Ada banyak teori dalam psikologi tentang motivasi. Misalnya saja teori-teori motivasi dari Abraham Maslow dan Alderfer. Maslow menyamakan motivasi dengan kebutuhan (*need*). Menurutnya, terdapat 5 tingkatan kebutuhan manusia. Pertama, *physiological needs*; kedua, *safety needs*; ketiga, *social needs (love and belonging) needs*; keempat, *esteem needs*; dan kelima, *self-actualization needs*. Berdasarkan teori Maslow, Alderfer, mengembangkan sebuah teori yang disebut ERG theory. Ia membagi kebutuhan dalam 3 tingkat, yakni: (1) *Existence needs*, yakni dorongan-dorongan untuk mendapatkan kepuasan fisiologis and materi. (2) *Relatedness needs*, yakni dorongan-dorongan untuk memuaskan hubungan interpersonal. (3) *Growth needs*, yakni kebutuhan-kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan psikologis.

Salah satu teori lain tentang motivasi yang cukup terkenal adalah yang dikemukakan oleh David McClelland (1985). Menurutnya, ada 3 motif atau kebutuhan dasar manusia, yakni *need for achievement*, *need for power*, dan *need for affiliation*.

Need for achievement adalah dorongan untuk melakukan sesuatu secara benar atau sempurna agar dapat diraih keberhasilan (kesuksesan). McClelland menulis, "*achievement motive is a unitary disposition within a person, which motivates him or her to face challenges in order to attain success and excellence*" (dalam Wu &Huang, 281).

Individu-individu yang memiliki tingkat *need for achievement* tinggi, pada umumnya memiliki beberapa ciri berikut:

1. merasa sangat senang ketika menghadapi risiko atau tantangan
2. memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan yang menantang itu
3. Kerja keras dan tidak mudah patah semangat
4. Bersedia menerima *feedback* demi kemajuan dan kesuksesan yang dicita-citakan
5. Memiliki daya tahan yang kuat ketika menghadapi kegagalan-kegagalan
6. Toleran terhadap ketidakpastian dan ambiguitas

Need for power adalah dorongan atau motif untuk mempengaruhi orang lain, untuk memiliki prestise, untuk merasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Winter (1973) mendefinisikan *power motive* sebagai: *.....desire to impact, control, and influence over another person, group, or the world at large*" (Winter, 1973). Menurut Winter dan McClelland, ada 2 jenis *power motive*, yakni motif untuk berkuasa yang bersifat pro-sosial dan yang bersifat individual atau personal. *Power motive* yang bersifat personal diekspresikan melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan egoistik, yakni demi untuk memenuhi kebutuhannya pribadi. Sebaliknya, dalam motif yang bersifat sosial, individu atau kelompok melakukan tindakan-tindakannya secara lebih bertanggung jawab, karena didorong untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Menjadi pimpinan kelompok, misalnya, merupakan usaha untuk membuat sejahtera anggota kelompok.

Individu-individu yang memiliki *need for power* yang tinggi sangat *concern* dengan posisi dan status. Mereka selalu mencari posisi untuk mendapatkan otoritas dan pengaruh. Ciri-ciri lain dari individu-individu yang memiliki *need for power* yang tinggi antara lain:

1. Menikmati kemenangan dalam berargumentasi
2. Menikmati konflik, kompetisi, dan berusaha memenangkan kompetisi itu
3. Memiliki kebutuhan untuk status, pengakuan, penghargaan orang lain

Need for affiliation adalah dorongan untuk menghabiskan waktu bersama orang lain. Menurut McClelland, “*affiliation motive is establishing, restoring, or maintaining a close, warm, friendly relationship with another or others, or being emotionally concerned over separation from someone else*” (p.346).

Motif ini bukan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain, tetapi untuk menjalin relasi sosial, untuk berinteraksi dengan orang lain. Individu-individu yang *need for affiliation*-nya tinggi umumnya berinisiatif untuk membangun kontak dan menjalin pertemanan dengan orang lain. Mereka ingin diterima dan disukai. Mereka banyak menghabiskan waktu dalam beberapa atau banyak aktivitas sosial, berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui telepon, sms, atau lainnya. Ciri-ciri lainnya adalah:

1. Ingin masuk dan menjadi bagian dalam kelompok.
2. Menghindari konflik dan menyukai kerja sama dibandingkan kompetisi
3. Tidak menyukai risiko yang besar dan ketidakpastian
4. Ingin disukai sehingga lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan anggota-anggota kelompoknya.

Menurut Wu & Huang (2013) di level organisasi, korupsi (dalam bentuk suap-menyuap) dapat terjadi dalam suatu organisasi yang memiliki motif untuk berprestasi (*achievement motive*) dan untuk berkuasa (*power motive*) yang lebih tinggi daripada motif untuk berafiliasi (*affiliation motive*).

3. *Locus of control*

Locus of control adalah keyakinan individu terhadap pusat kendali hidupnya, apakah terdapat di dalam diri individu itu sendiri (internal) atau di luar dirinya (eksternal). Psikolog yang pertama kali mempelajari konsep ini adalah Julian Rotter (1954, dalam Hodgkinson, 1999). Rotter membagi *locus of control* dalam dua dimensi, yakni internal dan eksternal. Sejumlah penelitian paska Rotter menunjukkan bahwa individu-individu yang memiliki internal *locus of control* antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Mudah terpengaruh oleh lingkungan

- kurang memiliki tanggung jawab untuk konsekwensi-konsekwensi yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku mereka yang tidak etis
- menyerah pada tekanan kelompok dan berperilaku sesuai dengan tuntutan kelompok itu

Sebaliknya, individu-individu yang memiliki external locus of control antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- memiliki standar moral sendiri dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.
- merasa bertanggung jawab atas kondisi buruk (musibah) yang menimpa lingkungan/kelompok/organisasinya
- memiliki kemampuan untuk melawan tekanan kelompok

Penelitian yang dilakukan oleh Boshoff & Zyl (2011) menunjukkan hasil bahwa ada hubungan antara *locus of control* dengan perilaku etis di dunia bisnis. Perilaku etis dalam konteks penelitian mereka termasuk perilaku korupsi. Boshoff & Zyl menggunakan teori dan angket *locus of control* dari Scheper yang membagi *locus of control* dalam tiga dimensi, yakni internal, eksternal, dan otonom. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa semakin internal *locus of control* individu, semakin tinggi perilaku etis individu tersebut. Demikian juga, semakin otonom individu, semakin tinggi perilaku etisnya. Namun sebaliknya, semakin eksternal *locus of control*, semakin rendah perilaku etisnya.

Dalam penelitian ini kami tidak menggunakan teori dan angket dari Rotter maupun Schaper, melainkan dari Lavenson (angketnya sering disebut *Lavenson multidimensional locus of control scales*) (1973). Lavenson mengembangkan teori Rotter tentang *locus of control* dengan cara antara lain mengembangkan dimensi *external locus of control*. Dia tidak lagi membagi konsep *locus of control* dalam dua dimensi, melainkan menjadi tiga. Yakni, *internality*, *powerfull others*, dan *chance*. Dua dimensi terakhir itu pada dasarnya merupakan pengembangan dari *external locus of control* dari Rotter. *Powerfull others* mengacu pada sejauh mana individu mendasarkan

perilakunya pada orang lain, terutama dari orang-orang yang memiliki pengaruh (*powerfull*) terhadap individu itu. Chance mengacu pada kekuatan tertentu di luar diri individu yang diyakini oleh individu itu menentukan nasib atau takdir dirinya. Sedangkan *internality* mengacu pada dimensi *internal locus of control*, yakni sejauh mana individu menentukan keputusan dan hidupnya pada dirinya sendiri.

2.2.5. Dampak korupsi

Apa pun penyebabnya, apakah psikologis maupun non-psikologis, korupsi berdampak destruktif, menimbulkan akibat buruk pada bangsa atau masyarakat. Beberapa dampak korupsi yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

Dampak pada sistem politik dan hukum. Korupsi, jika sudah mencapai tahap kronis, menjadi ancaman untuk penegakan demokrasi dan hambatan dibangunnya *good governance*. Demokrasi mempersyaratkan bekerjanya sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara sinergis, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Akan tetapi korupsi, terutama korupsi politik membuat fungsi lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak jelas dan saling bersinerji bukan untuk menjadi efektif dan efisien, melainkan untuk melakukan korupsi. Akibatnya, rakyat meragukan efektivitas pemerintahan demokrasi karena dinilai hanya menguntungkan para elit politik dan birokrasi serta sebagian pengusaha yang dekat dengan lingkaran elit tersebut, tetapi membuat sebagian rakyat menderita. Korupsi dalam pemilihan umum dan di DPR dapat mengurangi akuntabilitas partai-partai politik dan lembaga DPR dan mengurangi kualitas kebijakan politik yang mereka buat. Korupsi di pengadilan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada penegakan hukum (Khan, M.H. 2006).

Dampak pada kondisi ekonomi. Korupsi menyebabkan biaya operasional atau produksi menjadi sangat tinggi karena sebagian permodalan digunakan untuk menyuap para elit politik dan pemerintah. Korupsi pun menyebabkan ketidak-pastian dalam menjalankan bisnis atau usaha. Korupsi

menyebabkan rendahnya kompetisi dan berakibat pada menurunnya kualitas produksi. Dalam konteks perdagangan internasional, korupsi mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha dan menghambat daya saing dengan produk-produk Negara-negara lain. Korupsi pun menyebabkan sebagian modal dilarikan ke luar negeri untuk menghindari konsekuensi hukum di dalam negeri. Di samping itu, korupsi pun menjadikan sebagian rakyat menjadi sengsara. Bank Dunia mengungkapkan adanya hubungan antara tingkat korupsi suatu Negara dengan tingkat kemiskinan di Negara itu (www.worldbank.com).

Dampak pada lingkungan. Korupsi memfasilitasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berdasarkan *kongkalikong* antara para politisi di parlemen, para pejabat di pemerintahan, dan para pengusaha yang mengharap-kan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali tidak mengindahkan dan bahkan lingkungan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberi keuntungan ekonomi yang besar pada mereka (terutama para pengusaha), tetapi sering mengorbankan lingkungan alam dan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut boleh jadi bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang menjadi sangat destruktif karena kerusakan alam akibat kebijakan-kebijakan tersebut.

Dampak di bidang Kesehatan. Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Maka, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Akan tetapi, anggaran kesehatan seringkali tidak seluruhnya sampai ke masyarakat, karena sebagian disalahgunakan oleh para pengelolanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Akibatnya, hak masyarakat kecil (miskin) dan masyarakat di pedalaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah, terkendala karena anggarannya sebagian dikorupsi oleh para koruptor.

Dampak di bidang pendidikan. Salah satu indikator sekaligus pendorong kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Maka, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN idealnya harus relatif besar. Meski

pemerintah setiap tahun mengalokasikan sebagian dari APBN untuk pendidikan terus meningkat, tetapi pada prakteknya, anggaran tersebut tidak seluruhnya sampai kepada masyarakat, karena disalahgunakan oleh para pejabat yang mengelola dan melaksanakannya. Penggunaan anggaran pendidikan tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan menjadi ajang atau objek korupsi. Akibatnya, pendidikan masih tertinggal dari negara-negara maju. Mutu pendidikan rendah. Korupsi menjadi salah satu faktor penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan dan kemajuan suatu bangsa.

Dampak pada rasa keadilan. Korupsi menyebabkan hilangnya rasa keadilan. Korupsi berarti menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan yang sebetulnya bukan menjadi haknya. Hak orang lain, hak rakyat, atau negara, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan apa-apa yang seharusnya diterima. Masyarakat yang sering menjadi korban pada umumnya adalah masyarakat miskin, yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Ketidakadilan ini menggejala baik dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan semua bidang kehidupan. Sebagaimana ditulis oleh Transparency International (TI): *Corruption is one of the greatest challenges of the contemporary world. It undermines good government, fundamentally distorts public policy, leads to the misallocation of resources, harms the private sector and private sector development and particularly hurts the poor*" (Transparency International, 1998).

2.3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Bagaimana memberantas dan menanggulangi korupsi yang bersifat destruktif dan jahat itu? Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, satu-satunya lembaga yang sangat besar otoritasnya dalam menangani

dan memberantas korupsi adalah KPK. Kasus-kasus korupsi yang menimbulkan kerugian Negara sangat besar, yakni di atas Rp 1 milyar, dandilakukan oleh pejabat Negara, politisi, serta penegak hukum, lazimnya ditangani oleh KPK. Hingga saat ini, telah banyak pejabat, politisi, menteri, pengusaha, kepala daerah (gubernur dan bupati serta wali kota), hakim, jaksa, pengacara, polisi, yang ditangkap atau diputus sebagai tersangka dan diajukan ke pengadilan oleh KPK. Oleh sebab itu, tidak ada lembaga yang sangat ditakuti oleh para pelaku korupsi dan khususnya pelaku korupsi politik atau *grand corruption*, selain KPK.

KPK didirikan pada tanggal 27 Desember 2002 berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Alasan utama didirikannya komisi ini adalah selain makin ganasnya korupsi di Indonesia paska tumbangnya pemerintahan Orde Baru (Mei 1998), juga semakin rendahnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Lembaga-lembaga tersebut dinilai tidak bersih, korup, dan tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah kemudian mengusulkan UU tentang KPK ke DPR dan melalui sidang yang alot, dan DPR akhirnya menyetujui serta mensahkannya.

Mayarakat memahami KPK sebagai sebuah lembaga yang tugas dan wewenangnya adalah menindak para koruptor. KPK menangkap, memenjarakan, dan menuntut tersangka korupsi di pengadilan. Pemahaman seperti itu dimungkinkan karena media massa selalu memberitakan kasus-kasus di mana koruptor ditangkap, dipenjarakan, dan didakwa oleh KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Akan tetapi, KPK pun sebetulnya memiliki tugas lain yang tidak kalah penting, yakni melakukan pencegahan. KPK wajib melakukan kampanye, pendidikan, pelatihan anti-korupsi, mensosialisaikan perlawanan terhadap korupsi, baik di level kemeterian, organisasi, masyarakat, dan lingkungan pendidikan (sekolah dan universitas). Hanya saja, pemberitaan media tentang tugas pencegahan relatif minim, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.

Sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi, KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat *powerful*. KPK sering disebut sebagai lembaga yang *superbody*, karena memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dan memimpin lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dalam perkara-perkara korupsi. Tugas dan wewenang KPK antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi tersebut, KPK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

(Sumber: <http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=2>)

Disebabkan oleh besar dan luasnya wewenang KPK dalam memberantas korupsi, maka ada upaya-upaya untuk melemahkan dan

bahkan melenyapkan KPK. Sejumlah anggota parlemen yang terancam oleh kiprah KPK mewacanakan untuk melemahkan dan bahkan menghapus KPK. Mereka misalnya melemparkan gagasan bahwa KPK merupakan lembaga *ad hoc*, sementara, sehingga dapat dihapuskan. Namun, UU KPK dan Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan di salah satu pasal pun bahwa KPK adalah lembaga *ad hoc*. Ini berarti bahwa tidak dapat diinterpretasikan bahwa KPK bersifat sementara, dapat dibubarkan. Upaya pelemahan lainnya adalah dalam bentuk penarikan sejumlah penyidik KPK yang berasal dari unsur kepolisian (POLRI), sehingga kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi menjadi terhambat dan tumpul. Meski demikian, hingga saat ini, KPK terus berfungsi dan bekerja dengan baik. Kepercayaan dan dukungan luas dari masyarakat pun tidak pernah surut untuk menjadikan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang ditakuti oleh para koruptor.

2.4. Psikologi Politik

Psikologi politik dapat didefinisikan sebagai kajian psikologi mengenai perilaku individu atau kelompok individu dalam *setting* politik (Cottam, et.al., 2004). Psikologi politik pun dapat didefinisikan sebagai aplikasi teori-teori, metode-metode, dan prinsip-prinsip psikologi untuk menganalisis persoalan-persoalan dan isu-isu politik (Cottam, et.al., 2004).

Ini berarti bahwa objek kajian psikologi politik mencakup baik individu maupun kelompok individu dalam kaitannya dengan politik atau persoalan-persoalan dan isu-isu politik. Dalam konteks ini, psikologi politik beririsan dengan disiplin-disiplin ilmu lain, terutama ilmu politik. Ilmu politik mengkaji isu-isu dan persoalan-persoalan politik seperti sistem politik, peran lembaga-lembaga pemerintah (DPR, eksekutif, yudikatif), kebijakan, partai politik, media, dan lain-lain. Yang membedakan psikologi politik dari ilmu politik terutama adalah perspektifnya. Meski objek kajiannya relatif sama dengan ilmu politik, tapi psikologi politik sebagai

bagian dari ilmu psikologi, mengkaji objeknya dari perspektif psikologi, dari teori-teori psikologi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka korupsi sebagai suatu gejala yang berkaitan dengan politik coba dijelaskan dengan menggunakan teori-teori dan pendekatan psikologi. Teori-teori yang digunakan, selain teori-teori *traits* kepribadian, motivasi, dan juga teori tentang perilaku individu dalam kelompok (*intragroup behavior*) dan antar kelompok (*intergroup behavior*). Asumsinya, perilaku korupsi tidak hanya didorong oleh faktor internal (psikologis), tapi juga terkait dengan sistem atau lingkungan (kelompok) dimana pelaku berada. Maka sejumlah teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku korupsi diantaranya adalah: *personality, motivation, locus of control, obedience, conformity, compliance, power, diffusion of responsibility, conflict*, dan lain-lain.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan gambaran atau profil sejumlah faktor psikologis (internal) yang dimiliki oleh para pelaku korupsi. Faktor-faktor psikologis tersebut antara lain adalah motif atau motivasi, kepribadian, dan *locus of control*.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sejumlah pola korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Misalnya, pola korupsi yang dilakukan oleh para politisi di lembaga DPR, kementerian, penegak hukum, pejabat BUMN dan Bank Pemerintah, pengusaha, dan lain-lain.
3. Memahami dan mendeskripsikan pola-pola KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai korupsi bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Ada banyak lembaga, baik lembaga akademis (perguruan tinggi), *non-governmental organization (NGO)*, organisasi bisnis, maupun pemerintah yang melakukan penelitian mengenai korupsi. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan beragam pendekatan, antara lain politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Akan tetapi, penelitian dengan pendekatan psikologi, khususnya psikologi politik, relatif jarang ditemukan.

Penelitian ini hendak mengungkap perilaku korupsi dan penanganan atas perilaku korupsi tersebut dari perspektif psikologi, khususnya psikologi politik. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik praktis maupun teoritis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk KPK dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya serta lembaga-lembaga negara sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai penanganan dan prevensi korupsi.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi rujukan kajian-kajian tentang perilaku korupsi, khususnya dari perspektif psikologi. Dalam disiplin psikologi di Indonesia relatif sulit sekali ditemukan penelitian-penelitian tentang perilaku korupsi, terutama korupsi politik. Diharapkan penelitian ini menjadi awal untuk dimulainya penelitian-penelitian psikologi tentang korupsi di Indonesia.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Metode dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksploratif, baik dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Melalui metode deskriptif, peneliti bermaksud mendeskripsikan secara kuantitatif profil-profil psikologis yang dimiliki oleh para pelaku korupsi. Profil-profil yang dimaksud adalah kepribadian (*personality*), motif (*motive*), dan *locus of control*. Sumber datanya adalah berupa data kuantitatif yang diperoleh dari inventory yang berupa *self-report* dari para pelaku korupsi yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah atau sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Terdapat 3 angket atau inventory yang disusun oleh peneliti, yakni angket tentang motivasi, *locus of control*, dan kepribadian. Ketiga angket tersebut diisi oleh sebagian dari para penghuni Lapas Sukamiskin, Bandung. Lapas Sukamiskin adalah sebuah lapas yang mayoritas penghuninya adalah terpidana kasus-kasus korupsi.

Selain metode deskriptif yang bersifat kuantitatif, peneliti pun menggunakan metode eksploratif yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam metode ini berasal dari media massa, yakni berupa berita-berita, artikel-artikel, opini-opini mengenai korupsi dari media massa, baik cetak maupun internet. Media-media cetak yang datanya digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: *Kompas*, *Tempo*, dan *Media Indonesia*. Sedangkan dari internet adalah www.kompas.com, www.tempo.co, www.media-indonesia.com, www.detik.com; www.republika.co.id; www.antaraneews.com; dan website-website KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (www.kpk.go.id), ICW (Indonesia Corruption Watch) (www.antikorupsi.org), dan TII (Transparency International Indonesia) (www.ti.or.id). Kasus-kasus yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini terutama adalah

kasus yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini terutama adalah kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Dalam perspektif KPK, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus-kasus yang termasuk dalam kategori *grand corruption* (hasil wawancara peneliti dengan juru bicara KPK, Johan Budi SP, bulan Juli 2013). Akan tetapi, dalam perspektif teoritis, *grand corruption* relatif sama dengan *political corruption*. Ciri-ciri *political corruption* antara lain adalah: pelakunya merupakan pemegang wewenang atau kekuasaan politik dan/atau pemerintah; pada umumnya dilakukan secara kolektif (melibatkan pelaku-pelaku lain, baik dari kalangan pemerintah atau partai politik maupun swasta); besaran uang yang menjadi objek korupsi relatif besar (itulah sebabnya disebut *grand corruption*). Kasus-kasus korupsi seperti itu merupakan kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh KPK.

Alasan kenapa berita dari media menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah karena kasus yang dianalisis relatif sensitif, sehingga sulit bagi peneliti untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan. Kesulitan bukan saja karena terbatasnya biaya, dan kendala di lapangan, tetapi juga rentang waktu kasus-kasus korupsi dan penanganannya oleh KPK berlangsung selama lebih dari 10 tahun (antara tahun 2005 – Januari 2013). Hanya melalui berita dari media massa maka data dalam penelitian ini dapat diperoleh.

Data yang berupa pemberitaan media massa, terutama media massa yang bersifat investigatif, memiliki kelebihan, yakni mampu menjelaskan sebuah realitas di balik kasus yang tampak di permukaan. Terutama jika kasus yang diberitakan itu adalah berita tentang korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh Amundsen, dkk (2000, h. 37) berikut ini: “*The media are important sources of information also for social science research on corruption when it comes to establishing facts. Media are also important subjects of research on corruption, mainly for political scientist. Some forms of corruption may be considered as a kind of political scandals, and the*

political effects may often be quite similar to the publication of private misbehavior of politicians or their families.”

Meski demikian, diakui oleh peneliti bahwa data dari media massa bisa bias karena pemberitaan tentang suatu kasus boleh jadi tidak sepenuhnya objektif diungkap oleh wartawan. Cara pengungkapan dan pemberitaan mereka antara lain dipengaruhi oleh visi dan misi yang dimiliki oleh media-media tersebut, oleh ketertarikan dan sensitivitas mereka pada skandal-skandal tertentu agar dapat rating tinggi, dan oleh ideologi yang dimiliki oleh mereka dan melandasi pemberitaan mereka. Namun, peneliti meyakini bahwa di balik bias-bias tersebut terdapat satu kebenaran, yakni apa pun visi dan misi atau ideologi yang melandasi media-media tersebut, mereka pada umumnya memiliki idealisme dalam mengurangi atau memberantakan korupsi, sehingga kalau ada perbedaan-pemberitaan tertentu dalam pemberitaan mereka, peneliti dapat menangkap esensi yang mereka beritakan.

Di samping itu, peneliti pun akan melakukan kajian terhadap kasus-kasus korupsi baru, yang para pelakunya sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Untuk yang terakhir ini, peneliti akan mengikuti beberapa sidang mereka di pengadilan.

Sumber data berikutnya adalah (hasil) wawancara dengan nara sumber dari KPK. Wawancara dengan nara sumber dari KPK dimaksudkan untuk memahami dan mendapatkan gambaran mengenai pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi.

Di Tahap kedua, sumber data penelitiannya masih berupa berita-berita dari media massa, data inventory psikologis dari para pelaku korupsi, dan data dari KPK terutama pimpinan KPK, tetapi jumlah datanya diperbanyak dan kajiannya diperdalam. Kunjungan ke sidang-sidang pengadilan yang mengadili para tersangka korupsi pun ditingkatkan.

Di samping itu, peneliti pun akan mengikuti seminar-seminar atau diskusi-diskusi tentang korupsi politik untuk membandingkan gagasan-gagasan peneliti dengan gagasan-gagasan para pakar tentang korupsi. Selain

memungkinkan, peneliti akan menyelenggarakan seminar tentang korupsi dengan mengundang sejumlah pakar tentang korupsi. Penyelenggaraannya bekerja sama dengan fakultas (Fakultas Psikologi UNPAD) atau universitas (Universitas Padjadjaran).

4.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif berupa analisis statistik deskriptif untuk menemukan gambaran psikologis para pelaku korupsi. Gambaran psikologis dimaksud adalah profil kepribadian, motif, dan *locus of control*. *Software* program komputer yang digunakan untuk analisis statistik deskriptif adalah SPSS versi 17.

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data berupa teks dan naskah serta wawancara. Teks-teks atau naskah-naskah yang berisi pemberitaan media tentang korupsi sejak tahun 2002 dikumpulkan dan dibuat kliping, agar mudah membaca dan menganalisisnya. Sedangkan teks-teks yang berasal dari internet dikumpulkan dalam sejumlah file yang isinya berupa hasil copy dan paste dari banyak berita yang berasal dari www.kompas.com; www.tempo.com; www.detik.com; www.kpk.go.id; File-file tersebut disimpan dalam beberapa folder dan sebagian dicetak untuk memudahkan membaca dan menganalisisnya. Setiap naskah dibaca berulang-ulang dan kalimat-kalimat tertentu yang penting dan relevan dengan penelitian ini diberi tanda untuk memudahkan pengkategorisasian.

Ketegorisasi data dibuat berdasarkan pada tema-tema tertentu. Misalnya: kategori pelaku korupsi didasarkan pada jenis-jenis pekerjaan mereka, seperti: politisi (anggota DPR), menteri, kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), penegak hukum (hakim, jaksa, terdakwa, pengacara, pegawai MA dan pengadilan tinggi, dll); tipe-tipe korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi (misalnya, suap-menyuap; gratifikasi; penyalahgunaan APBN dan APBD); pola-pola khas yang dilakukan oleh para pelaku korupsi; dan lain-lain. Semua proses itu hasilnya ditayangkan

penyalahgunaan APBN dan APBD); pola-pola khas yang dilakukan oleh para pelaku korupsi; dan lain-lain. Semua proses itu hasilnya ditayangkan dalam bentuk tabel. Setelah itu, hasil kategorisasi tersebut lalu dideskripsikan dan diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah narasi tentang perilaku korupsi dan penanganannya di Indonesia.

Langkah analisis berikutnya adalah menemukan pola perilaku korupsi yang umumnya dilakukan oleh para pelaku korupsi tersebut. Misalnya, apakah mereka pada umumnya melakukan korupsi secara sendiri-sendiri atau secara kolektif (bersama-sama)? Jika secara kolektif, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Apakah mereka melakukan korupsi karena peran atau pekerjaan mereka (sebagai anggota parlemen, pejabat, atau aparat penegak hukum) atau karena faktor-faktor lain?

Analisis berikutnya ditujukan untuk menemukan pola kerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Oleh sebab itu, langkah analisisnya terutama difokuskan pada kinerja, capaian kerja, dan apa yang telah dan akan dikerjakan oleh KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi sejak terbentuknya KPK pada tanggal 27 Desember 2002 sampai sekarang (November 2013). Sumber datanya bukan hanya berasal dari website KPK, tapi terutama juga data-data yang telah dikemukakan oleh KPK (antara lain, melalui juru bicara KPK) di sejumlah media massa.

Teknik analisis berikutnya adalah analisis koding sebagaimana digagas oleh Strauss and Corbin (2000). Teknik ini digunakan untuk menganalisis data hasil interviu, baik interviu dengan para pelaku dan tersangka korupsi maupun dengan juru bicara, penyidik dan pimpinan KPK. Teknik ini pun digunakan untuk menganalisis hasil seminar dan diskusi dengan para pakar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2013. *Pola Perilaku Korupsi Para Koruptor Di Indonesia Dan Pola Penanganan Kasus-Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian Psikologi Politik*. Laporan Penelitian. Hibah Fakultas Psikologi UNPAD
- Abidin, Z dan Prathama, A.G. 2009. *Studi psikososial tentang Korupsi di Indonesia*. (Laporan Penelitian). Hibah Kompetitif, DIKTI)
- Abidin, Z. Pelajaran Moral dari Kasus Urip-Artalyta, dalam Kompas, 2010. *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Gramedia
- Abidin, Z; Purwono, U; dan Prathama, A.G. 2011. *Studi Psikososial tentang Korupsi di lingkungan birokrasi di Indonesia*. (Laporan penelitian). LPPM UNPAD
- Alkostar, Artidjo, 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press
- Amundsen, Inge. 1997. *Political Corruption: An Introduction to the Issues*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights
- Amundsen, Inge. 1999. *Political corruption: Introduction to the issues*. Bergen: Norway. Michelsen Institute
- Aremu, A.O., Pakes, F. & Johnston, L. 2009. The effect of locus of control in the reduction of corruption in the Nigerian police. *An International Journal of Police Strategies & Management* Vol. 32 No. 1, 2009 pp. 144-156. www.emerald-insight.com/1363-951X.htm. Accessed: 19/08/2013 21:56
- Boshoff, E. & Zyl, E.S. van. 2011. *The relationship between locus of control and ethical behavior among employees in the financial sector*. In Koers 76(2), 2011: 283-303
- Brytting, T., Minogue, R., Morino, P. *The anatomy of fraud and corruption. Organizational causes and remedies*. Gower
- Carver, C. S. & Scheier. 2004 (fifth edition). *Perspective on personality*. Boston: Pearson

- Cherry, John. 2006. The Impact of Normative Influence and Locus of Control on Ethical Judgments and Intentions: A Cross-Cultural Comparison. *Journal of Business Ethics*, Vol. 68, No. 2 (Oct., 2006), pp. 113-132. Published by: Springer. URL: <http://www.jstor.org/stabel/25123901>. Accessed: 22/08/2013 11:30. Your use of the JSTOR archive indicates your
- Conelly, B. S. & Ones, D. S. 2008. "The personality of corruption. A national-level analysis." In *Cross-cultural research*. Vol 42, Number 4, p. 353-385
- Cottam, M.L., Dietz-Uhler, B., Maters, M. Preston, T. 2004. *Introduction to Political Psychology*: 2nd Edition. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates
- Hodgkinson, G.P. 1999. Development and Validation of the Strategic Locus of Control Scale. Source: *Strategic Management Journal*, Vol. 13, No. 4 (May, 1992), pp. 311-317. Published by: Wiley. URL: <http://www.jstor.org/stabel/2486617>. Accessed: 19/08/2013 21:13
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2011. *Evaluasi Roadmap penegakan Hukum KPK 2012 – 2015*. www.antikorupsi.org. diunduh 29 Desember 2012
- KPK. Siaran Pers Akhir Tahun KPK 2012, 2012/12/27
- KPK. 2012. Laporan tahunan 2012
- KPK. 2011. Laporan tahunan 2011
- KPK. 2010. Laporan tahunan 2010
- KPK. 2009. Laporan tahunan 2009
- KPK. 2008. Laporan tahunan 2008
- Khan, M.H. 2006. Determinants of corruption in developing countries: the limits of conventional economic analysis. In Rose-Ackerman.(ed.). 2006. *International Handbook on the economics of corruption*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgard
- Lambsdorff, J. G., 2006, "Causes and consequences of corruption: What do we know from a cross-section of countries," in Rose-Ackerman, S. (ed.),

2006. *International Handbook on the economics of corruption*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgard
- Levenson, H. 1973. *Reliability and validity of the P, I, and C scales. A multidimensional view of locus of control*. Paper presented at American Psychological association convention (Montreal, Canada, August, 1973)
- McClelland, D. C. 1985. How motives, skills, and values determines what people do. *American Psychologist*, 40, 812-825
- McCrae, R.R. & Costa, P.T. 2006 (second edition). *Personality in adult. A Five-factor theory perspective*. New York: The Guilford Press.
- Miner, J.B. 2005. *Organizational behavior 1. Essential theories of motivation and leadership*. New York: M.E. Sharpe.
- Monroe, Kristen Renwick; Chiu, William ; Adam Martin, and Portman, Bridgette, "What Is Political Psychology?" In *Perspectives on politics*, December 2009, Vol. 7/No. 4, p. 859-882
- Myint, U. *Asia-Pacific Development Journal* Vol. 7, No. 2, December 2000. Corruption: Causes, Consequences, and cures
- Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. 2005. *Personality. Theory and research*. Hoboken (USA): John Wiley & Sons, Inc.
- Philp, Mark. 1997. "Defining political corruption". *Political studies*. XLP (436-462)
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi memberantas korupsi. Elemen sistem integritas nasional*. (terjemahan dari *Confronting corruption: the elements of national integrity system*, Jeremy Pope and Transparency International, 2002
- Raja, Usman. 2004. *The relationship of the big five personality dimensions to personal and organizational outcomes: answering the question who? And when?* Dissertation in Concordia University, Montreal, Quebec, Canada
- Rose-Ackerman, S (ed.). 2006. *International Handbook on the economics of corruption*. Cheltenham, U.K.: Edward

- Schmidt, L.C. & Frieze, I.H. 1997. "A mediational model of power, affiliation, and achievement motive and product involvement." In *Journal of business and psychology*. Vol 11, No 4 (Jun, 1997), p. 425-446.
<http://www.jstor.org/stabel-/25092564>. Accessed: 19/08/2013
- Sears, D. O; Huddy, L; Jervis. R. 2003. *Oxford Handbook of political psychology*. Oxford University Press
- Tavits, M. 2005. Causes of corruption: testing competing hypotheses.
<http://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/papers/2005/Tavits%20Nuffield%20WP.pdf>. Accessed: 06/03/2012.
- Transparency International, <http://www.transparency.de/mission.html> (Dec. 15th, 1998).
- Wu, Wann-Yin & Huang, Chu-Hsin. 2013. "Motives and likelihood of bribery: an experimental study of managers in Taiwan". In *Ethics & Behavior*, 23(4), 278-298
- Zyglidopoulos, S. C., Fleming, P. J., Rothernberg, S. 2008. Rationalization, overcompensation, and the escalation of corruption in organization. In *Journal of business ethics*. Springer 2008

Sumber dari media massa online:

www.kompas.com, www.tempo.co, www.mediaindonesia.com,
www.detik.com; www.republika.co.id; www.sinar-harapan.co.id.

Sumber dari website-website:

KPK (www.kpk.go.id), ICW (Indonesia Corruption Watch) (www.antikorupsi.org), dan TII (Transparency International Indonesia) (www.ti.or.id).

Sumber dari media cetak:

Kompas, *Tempo*, dan *Media Indonesia*

LAMPIRAN 1: INSTRUMEN (INVENTORY/ANGKET)



FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG
SEPTEMBER 2013

Salam hormat,

Perkenalkan, kami tim peneliti Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, bermaksud melakukan penelitian mengenai aspek-aspek psikologis dan evaluasi diri sendiri. Penelitian ini murni untuk tujuan akademis dan hasilnya untuk rekomendasi perbaikan sistem birokrasi dan kesejahteraan individu (*well-being*), jadi sama sekali tidak ada tujuan politis atau hukum.

Dalam konteks itu, kami mohon bantuan saudara untuk mengisi angket berikut di bawah ini. Kami tidak akan menanyakan identitas saudara secara pribadi, karena penelitian ini tidak menganalisis individu, melainkan kelompok (social). Selain itu, identitas saudara sangat kami rahasiakan, sesuai dengan kode etik yang kami junjung tinggi dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu psikologi. Oleh sebab itu, saudara dapat mengisi angket ini secara jujur, sesuai dengan yang saudara alami, rasakan, pikirkan, dan lakukan. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan dan kebaikan kita semua.

Atas perhatian, kerja sama, dan kesediaan saudara mengisi angket ini, kami sampaikan terima kasih.

Salam,
Tim Peneliti Fakultas Psikologi UNPAD

DATA UMUM PARTISIPAN

- 1 Jenis kelamin Laki-laki
 Perempuan
- 2 Usia saat ini ±.....tahun
- 3 Pekerjaan terakhir Pengusaha
 Karyawan
 Pengurus Partai Politik
 Anggota Parlemen
 PNS
 Polisi/TNI
 Pegawai BUMN
 Lainnya
- 4 Berada di tempat ini (Lapas) sudah berapa lama? < 1 tahun
 2 – 3 tahun
 4 – 5 tahun
 > 5 tahun
 > 10 tahun
- 5 Berada di tempat ini karena pengadilan memutus saudara terlibat kasus: Kriminal
 Terorisme
 Korupsi
 Narkoba
 Lainnya:
- 6 Jika saudara diputus oleh pengadilan terlibat kasus korupsi, pasal apa yang dituduhkannya? Suap-menyuap
 Gratifikasi
 Pemerasan
 Lainnya
- 7 Terkait pertanyaan nomor 6, menurut saudara, sebetulnya saudara: Tidak pernah terlibat seperti yang diputuskan oleh pengadilan
 Terlibat tapi hanya melaksanakan tugas (perintah) atasan/orang lain
 Terlibat seperti yang diputuskan oleh pengadilan
 Lainnya.....

BAGIAN I:

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang kurang lebih menggambarkan evaluasi saudara terhadap diri saudara sendiri. Setiap pernyataan diawali dengan kalimat "Selama ini saya termasuk orang yang" Pernyataan-pernyataan berikutnya di bawah ini adalah lanjutan dari kalimat itu. Setelah membaca pernyataan-pernyataan tersebut, saudara diminta untuk memberi tanda "√" pada kotak-kotak (dalam tabel) sebelah kanan, di bawah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pilihan angkanya adalah sebagai berikut:

- 1 = Sangat tidak setuju dengan pernyataan itu
- 2 = Tidak setuju dengan pernyataan itu
- 3 = Agak tidak setuju dengan pernyataan itu
- 4 = Agak setuju dengan pernyataan itu
- 5 = Setuju dengan pernyataan itu
- 6 = Sangat setuju dengan pernyataan itu

Selama ini saya termasuk orang yang

NO	PERNYATAAN	PILIHAN					
		1	2	3	4	5	6
1	mudah cemas, terutama ketika menghadapi situasi baru						
2	memiliki pola hidup yang teratur						
3	lebih suka bekerja sama dengan orang lain dibandingkan bekerja sendiri						
4	mudah marah ketika menghadapi situasi yang tidak saya harapkan						
5	tidak pernah merasa putus asa						
6	sederhana						
7	pemalu						
8	kurang nyaman bertanya pada bawahan atau orang-orang yang lebih muda dari saya						
9	tidak pernah merasa kesepian di mana pun saya berada						
10	senang mencari pengetahuan baru						
11	memikirkan semua konsekwensi dari apa yang akan saya lakukan						
12	tidak mudah stress (merasa tertekan) dalam menghadapi masalah						
13	merasa bahwa hidup saya akan berakhir menyedihkan						
14	mudah terpancing oleh perilaku orang-orang di sekitar saya						
15	senang berdiskusi (ngobrol) dengan teman-teman						
16	jika mengerjakan sesuatu hal, maka focus dalam hal itu						
17	mudah terpengaruh oleh suasana (lingkungan) sekitar saya						

18	mampu mengungkapkan rasa suka atau tidak suka kepada orang lain								
19	mudah akrab dengan orang-orang yang baru saya kenal								
20	senang berada bersama dengan teman-teman								
21	biasanya memendam (menyimpan dalam hati) apa yang harusnya saya ungkapkan kepada orang lain								
22	suka melakukan kegiatan-kegiatan yang menantang								
23	merasa bahagia dengan hidup saya								
24	memiliki banyak aktivitas								
25	kurang bisa berpikir dari sisi positif tentang banyak hal yang saya alami								
26	senang membuka percakapan dengan orang lain								
27	merasa sudah tidak lagi memiliki masa depan								
28	suka menjalin pertemanan dengan sebanyak mungkin orang								
29	senang memikirkan perubahan-perubahan untuk kehidupan yang lebih baik								
30	sebelum bertindak, memikirkan untung rugi dari tindakan saya								
31	kurang hati-hati dalam membuat keputusan								
32	senang mencoba melakukan sesuatu yang baru								
33	kurang suka membaca								
34	kurang tertarik pada persoalan-persoalan sosial								
35	melakukan apa yang harus saya lakukan, meskipun orang lain mungkin tidak suka								
36	senang terlibat dalam beberapa organisasi/kelompok (misalnya, asosiasi profesi, alumni, dll)								
37	tidak pernah merasa khawatir dalam menghadapi peristiwa apa pun								
38	tidak bisa bicara apa adanya (terus terang) karena khawatir menyakiti orang lain								
39	tidak mudah terpengaruh oleh penderitaan orang lain, karena kebanyakan dari mereka malas dan pura-pura menderita								
40	dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran saya kepada teman-teman secara langsung								
41	tidak mudah merasa kasihan pada orang lain								
42	tidak pernah gugup berhadapan dengan orang-orang baru								
43	kurang memberi perhatian pada orang lain								
44	jika bicara kepada orang lain, langsung pada pokok persoalan (to the point)								
45	tidak keberatan untuk menyetujui/menyepakati sesuatu								

	agar tidak mengecewakan orang lain							
46	jika menolong, akan mempertimbangkan akibat atau konsekwensi-konsekwensinya untuk saya							
47	percaya bahwa semua orang pada dasarnya baik							
48	senang mengoleksi barang-barang yang memiliki nilai tinggi							
49	menyukai lingkungan tempat saya tinggal							
50	percaya pada itikad baik orang lain							
51	menginginkan beragam aktivitas yang berbeda-bada							
52	kurang memperhatikan nilai-nilai dalam kehidupan politik negeri ini							
53	memiliki banyak keistimewaan dibandingkan yang dimiliki oleh orang lain							
54	percaya bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki motif tertentu yang sifatnya egoistik							
55	mampu menahan marah pada saat ada provokasi							
56	tertarik pada nilai-nilai atau persoalan-persoalan agama							
57	dapat diandalkan dalam mengerjakan tugas-tugas / pekerjaan							
58	senang menolong karena mungkin saja suatu hari nanti saya memerlukan pertolongan dari orang yang saya tolong itu							
59	memiliki aktivitas yang relatif sama dari hari ke hari							
60	menguasai bidang pekerjaan saya							
61	memiliki jadwal kegiatan harian untuk menyelesaikan pekerjaan saya							
62	memiliki kompetensi (kompeten)							
63	selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik di tempat kerja saya							
64	jika menolong, tidak pernah terpikir tentang balasan dari siapa pun							
65	sangat disiplin							
66	selalu mempertimbangkan semua konsekwensi sebelum melakukan perbuatan tertentu							
67	selalu berusaha semaksimal mungkin dalam hal apa pun							
68	suka menunda pekerjaan							
69	selalu hati-hati dalam berperilaku							
70	puas dengan apa yang telah saya capai							
71	keras terhadap diri saya sendiri							
72	tidak akan berhenti sampai pekerjaan yang saya kerjakan selesai secara tuntas							
73	selalu tenang dalam memecahkan setiap masalah							
74	biasanya mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain							

75	menghindari konflik dengan orang lain						
76	suka lupa pada aturan-aturan atau nilai-nilai yang berlaku di sekitar saya						
77	dapat belajar tentang makna hidup dari penderitaan-penderitaan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang saya alami						
78	suka berhayal tentang kondisi bangsa kita						
79	jika berperilaku mendasarkan diri pada pertimbangan moral						
80	mudah tersinggung oleh perkataan atau perilaku orang lain						
81	tidak suka berpikir abstrak						
82	dapat menikmati karya-karya seni (kesenian)						
83	enerjik						
84	menyukai keindahan (estetika)						
85	sensitif sehingga tidak mudah menjalin hubungan dekat dengan orang lain						
86	dapat mengambil hikmah (manfaat) dari pengalaman yang saya alami						
87	tidak dapat mengapresiasi karya-karya seni karena bagi saya seni terlalu abstrak						
88	merasa tidak nyaman berkumpul dalam waktu relative lama bersama orang lain						
89	tidak suka pekerjaan-pekerjaan yang penuh risiko						
90	memiliki hobi yang penuh tantangan atau menegangkan						

BAGIAN II:

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang kurang lebih menggambarkan evaluasi saudara terhadap diri saudara sendiri. Setelah membaca pernyataan-pernyataan tersebut, saudara diminta untuk memberi tanda "√" pada kotak sebelah kanan, di bawah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, sesuai dengan derajat kesetujuan dan ketidaksetujuan saudara terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Pilihan angkanya adalah sebagai berikut:

- 1 = Sangat tidak setuju dengan pernyataan itu
- 2 = Tidak setuju dengan pernyataan itu
- 3 = Agak tidak setuju dengan pernyataan itu
- 4 = Agak setuju dengan pernyataan itu
- 5 = Setuju dengan pernyataan itu
- 6 = Sangat setuju dengan pernyataan itu

NO	PERNYATAAN	PILIHAN					
		1	2	3	4	5	6
1	Teman-teman enggan bercerita tentang persoalan-persoalannya kepada saya karena mereka tahu bahwa saya tidak dapat membantu mereka						
2	Saya tidak suka melakukan sesuatu yang terlalu berisiko						
3	Saya senang bisa tampil di depan umum (publik)						
4	Ketika sedang antre, saya akan langsung menegur orang yang memotong antrean di depan saya						
5	Saya merasa tidak nyaman berada dalam situasi konflik dengan orang lain						
6	Saya tidak akan puas sampai saya menjadi yang terbaik dalam bidang (pekerjaan) saya						
7	Saya merasa tidak nyaman mengeluhkan atau mengadakan pelayanan yang buruk di tempat-tempat tertentu (misalnya di restaurant, rumah sakit, dll)						
8	Disukai atau tidak disukai oleh orang lain, tidaklah begitu penting buat saya						
9	Dari pengalaman terbukti bahwa pangkat atau kedudukan memiliki makna dan arti penting buat saya						
10	Saya kurang menyukai tugas-tugas yang menuntut saya untuk bersosialisasi dengan orang banyak						
11	Pekerjaan apa pun saya selesaikan secara tuntas						
12	Meskipun saya sedang sakit, saya tetap bekerja jika menurut saya penting						

13	Saya senang jika orang lain setuju dengan pendapat atau kemauan saya						
14	Saya tidak percaya diri jika harus memberi pengarahan atau pendapat kepada orang lain						
15	Saya lebih suka makan siang bersama teman-teman dibandingkan makan sendirian						
16	Dalam berdebat, saya biasanya lebih unggul dari lawan saya						
17	Saya menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan mengelola dan mengontrol organisasi atau kelompok						
18	Saya sering menargetkan tujuan yang bagi orang lain mungkin sulit untuk dicapai						
19	Saya senang memiliki pekerjaan atau kesempatan untuk mempengaruhi orang lain						
20	Saya tidak marah saat mengetahui bahwa ada orang lain yang kurang menghargai saya						
21	Penting buat saya memiliki sesuatu yang dapat membuat orang lain terkesan kepada saya						
22	Saya kurang meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan keluarga						
23	Saya memilih hobi-hobi yang menuntut kerja sama atau berbagi (sharing) dengan orang lain						
24	Saya selalu mencari cara mengerjakan pekerjaan secara lebih baik dan lebih cepat						
25	Saya termasuk orang yang perfectionist (menuntut kesempurnaan), menuntut semuanya dikerjakan secara benar						
26	Saya selalu bekerja sesuai dengan besar kecilnya imbalan yang saya terima						
27	Saya menikmati pekerjaan yang menantang						
28	Saya menikmati saat berkompetisi (bersaing) dengan orang lain						
29	Saya merasa tidak nyaman ketika harus memberi tahu orang lain apa yang harus mereka kerjakan						
30	Penting buat saya mendapatkan feedback dari orang lain untuk mencapai prestasi yang lebih baik						

BAGIAN III:

Seperti pada Bagian II, di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang kurang lebih menggambarkan evaluasi saudara terhadap diri saudara sendiri. Setelah membaca pernyataan-pernyataan tersebut, saudara diminta untuk memberi tanda "√" pada kotak sebelah kanan, di bawah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, sesuai dengan derajat kesetujuan dan ketidaksetujuan saudara terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Pilihan angkanya adalah sebagai berikut:

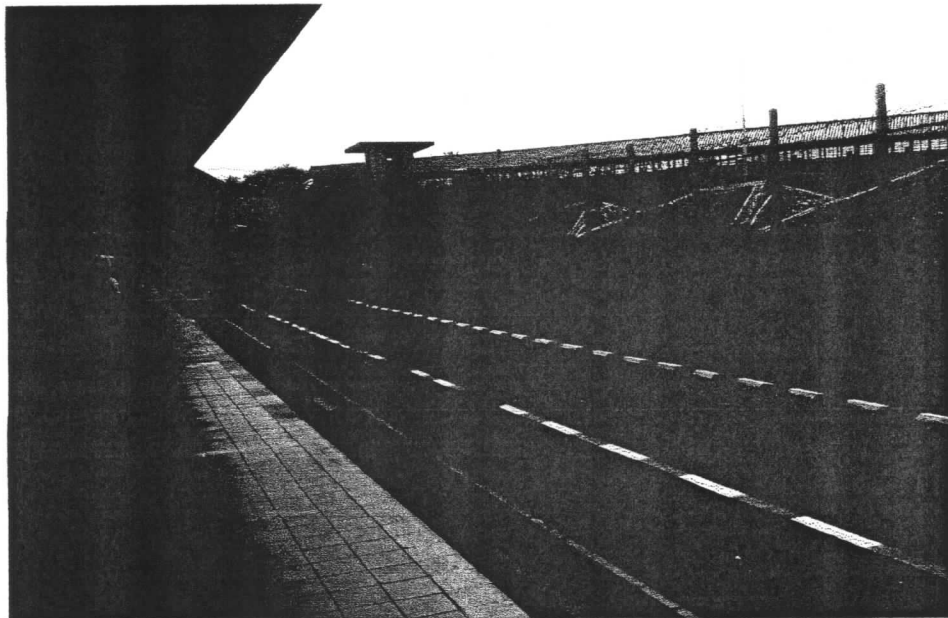
- | |
|---|
| 1 = Sangat tidak setuju dengan pernyataan itu |
| 2 = Tidak setuju dengan pernyataan itu |
| 3 = Agak tidak setuju dengan pernyataan itu |
| 4 = Agak setuju dengan pernyataan itu |
| 5 = Setuju dengan pernyataan itu |
| 6 = Sangat setuju dengan pernyataan itu |

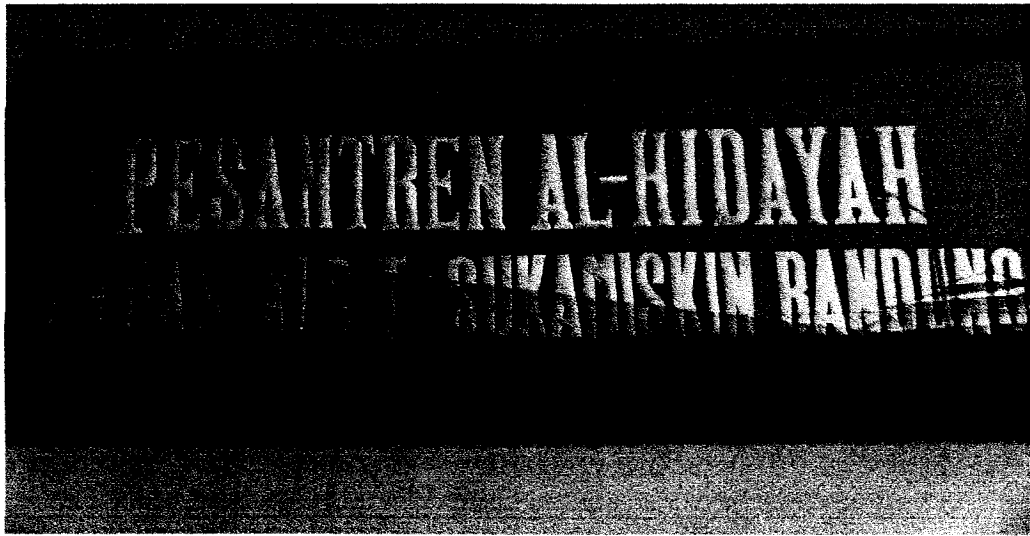
NO	PERNYATAAN	PILIHAN					
		1	2	3	4	5	6
1	Saya merasa apa yang terjadi dalam hidup saya banyak ditentukan oleh orang lain (misalnya oleh istri/suami, atasan atau pimpinan, dll)						
2	Tidak bijak buat saya berencana terlalu jauh (tinggi) karena banyak hal dalam hidup ini terjadi lantaran nasib baik atau nasib buruk						
3	Banyak atau sedikitnya teman ditentukan oleh jabatan yang diemban oleh seseorang						
4	Meski mungkin saja saya punya kemampuan yang baik (tinggi), tapi karier saya tidak akan meningkat tanpa bantuan orang-orang lain (misalnya, atasan atau pimpinan, para kolega, orang-orang lain yang punya pengaruh, dll)						
5	Jika saya merencanakan sesuatu, hampir pasti bahwa saya melaksanakan rencana itu						
6	Seberapa banyak teman yang saya miliki tergantung pada seberapa baik saya kepada mereka						
7	Ketika terlibat konflik atau perselisihan dengan orang-orang yang lebih kuat, maka orang seperti saya hanya punya sedikit kesempatan untuk melindungi diri						
8	Jika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, itu karena saya sedang beruntung						
9	Saya sering mengalami bahwa apa yang akan terjadi ternyata betul-betul terjadi di luar kendali saya						
10	Hidup saya ditentukan oleh tindakan-tindakan saya						

	sendiri							
11	Apakah saya mengalami kecelakaan lalu lintas atau tidak, hal tu adalah kebetulan belaka (karena nasib baik atau nasib buruk)							
12	Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, terlebih dulu saya perlu menyenangkan orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan							
13	Apakah saya mengalami kecelakaan lalu lintas atau tidak, itu tergantung pada orang (pengemudi) lain							
14	Apakah saya bisa menjadi pemimpin atau tidak tergantung pada apakah saya cukup beruntung untuk berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat							
15	Langsung maupun tidak langsung hidup saya ditentukan oleh orang lain							
16	Sampai sejauh ini hidup saya sering dipenga-ruhi oleh peristiwa-peristiwa yang bersifat kebetulan, tanpa saya bisa mengendalikannya							
17	Saya sering tidak memiliki kesempatan untuk melindungi diri dari peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kendali saya							
18	Jika orang-orang penting (misalnya, atasan saya) tidak menyukai saya, maka artinya saya mungkin memang kurang disukai							
19	Saya sepenuhnya dapat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup saya							
20	Agar rencana-rencana saya dapat berjalan atau dilaksanakan, maka saya perlu memastikan apakah rencana-rencana itu cocok atau tidak dengan keinginan orang-orang lain, terutama atasan atau klien							
21	Apakah saya bisa atau tidak bisa menjadi pemimpin, sepenuhnya tergantung pada kemampuan saya							
22	Apakah saya mengalami atau tidak mengalami kecelakaan lalu lintas, itu sepenuhnya tergant-ung pada keterampilan saya mengemudi							
23	Saya biasanya dapat melindungi diri saya sendiri, tanpa bantuan orang lain							
24	Jika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, itu karena hasil usaha saya							

TERIMA KASIH

**LAMPIRAN 2: GAMBAR LOKASI DAN SITUSI PENELITIAN DI
LAPAS SUKAMISKIN, BANDUNG**





LAMPIRAN 3: PERSONALIA TENAGA PENELITI DAN KUALIFIKASINYA

No	Nama/NIDN	Institusi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Zainal Abidin, M.Si./0022096203	Fakultas Psikologi UNPAD	Psikologi Sosial	15	Merancang disain penelitian, pendalaman teori, ambil data di lapangan, analisis data, penulisan laporan
2	Dr. A. Gimmy Prathama, M.Si./0028086202	Fakultas Psikologi UNPAD	Psikologi Klinis	10	Tes dan interpretasi kepribadian, ambil data, interpretasi data, penulisan laporan
3	Drs. H.R.A. Suherman, M.Si./0008025101	Fakultas Psikologi UNPAD	Psikologi Klinis	10	Tes dan interpretasi kepribadian, ambil data, interpretasi data, penulisan laporan

LAMPIRAN 3: PERSONALIA TENAGA PENELITI DAN KUALIFIKASINYA

No	Nama/NIDN	Institusi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Zainal Abidin, M.Si/0022096203	Fakultas Psikologi UNPAD	Psikologi Sosial	15	Merancang disain penelitian, pendalaman teori, ambil data di lapangan, analisis data, penulisan laporan
2	Dr. A. Gimmy Prathama, M.Si./0028086202	Fakultas Psikologi UNPAD	Psikologi Klinis	10	Tes dan interpretasi kepribadian, ambil data, interpretasi data, penulisan laporan
3	Drs. H.R.A. Suherman, M.Si./0008025101	Fakultas Psikologi UNPAD	Psikologi Klinis	10	Tes dan interpretasi kepribadian, ambil data, interpretasi data, penulisan laporan